

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

**PENGUATAN KOMITMEN
AKADEMIK DALAM
MEMPERKOKOH JATIDIRI PKn**

EDITOR:

Prof. Dr. Sapriya, M.Ed.
Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., M.Si.
Syaifullah, S.Pd., M.Si.
Muhammad Mona Adha, M.Pd.
Candra Cuga, M.Pd.



**LABORATORIUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL
PENGUATAN KOMITMEN AKADEMIK DALAM MEMPERKOKOH
JATIDIRI PKn**

ISBN 978-602-8418-27-0

Editor

Prof. Dr. Sapriya, M.Ed.
Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., M.Si.
Syarifullah, S.Pd., M.Si.
Muhammad Mona Adha, M.Pd.
Landra Cuga, M.Pd.

Penerbit

Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan
Departemen Pendidikan Kewarganegaraan
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Universitas Pendidikan Indonesia
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154
Telp. 2013103 Pes. 2512

PENGANTAR EDITOR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas ijin-Nya, kami dapat merampungkan penyusunan prosiding Seminar Nasional dengan tema **“Penguatan Komitmen Komunitas Akademik dalam Memperkokoh Jatidiri PKn”**, yang diselenggarakan di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia pada tanggal 4 April 2015.

Konten artikel dalam prosiding ini merujuk kepada sub tema seminar, yakni : (1) Tantangan PKn sebagai Sistem Pengetahuan Terintegrasi; Analisis Filosofik; (2) Penguatan Jatidiri PKn melalui Pengembangan Kultur Akademik; (3) Kebutuhan akan *Capacity Building* Komunitas Akademik PKn di tengah penetrasi Globalisasi; (4) Praxis Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah: Belajar dari Pengalaman; (5) Revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Warganegara Sadar Konstitusi.

Gagasan yang disampaikan oleh para penulis sudah barang tentu sangat beragam sesuai dengan latar belakang keilmuan dan pengalaman masing-masing, namun masih dalam konteks sub tema di atas. Keragaman perspektif tersebut, merupakan hal yang sangat wajar, mengingat kajian pendidikan kewarganegaraan (*civic/citizenship education*) tidak bersifat monodisiplin, melainkan bersifat multi, intra dan transdisiplin. Justeru dengan kajian yang bersifat multi dan transdisiplin tersebut, memungkinkan kajian pendidikan kewarganegaraan sangat menarik dan menantang, tidak saja bagi komunitas akademik PKn, juga bagi para pemerhati atau penggiat yang memiliki *concern* yang tinggi terhadap kajian PKn.

Terlebih dalam konteks kekinian, berbagai fenomena yang muncul, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kajian PKn, menuntut respon kritis (*critical responses*) dari komunitas akademik PKn, yang berorientasi pada alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Pendidikan Kewarganegaraan, baik dalam dimensi kajian akademik, dimensi kurikuler, maupun dimensi gerakan sosio-kultural, memiliki peran strategis dalam memecahkan beragam persoalan yang muncul di masyarakat yang terkait dengan masalah-masalah kemasyarakatan kekinian (*current civic affairs*).

Pada kesempatan ini, tim editor menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama secara sinergis, sehingga memungkinkan prosiding ini dapat diterbitkan dengan baik. Tak lupa, dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan permohonan maaf andaikata dalam prosiding ini masih terdapat hal-hal yang dirasa belum memadai atau sesuai dengan harapan.

Untuk itu, demi penyempurnaan prosiding ini, kami sangat berharap sumbang saran atau masukan yang konstruktif dari para pembaca yang budiman. Kami sangat berbesar hati untuk menerima saran tersebut.

Selamat membaca

Bandung, 30 Maret 2015

Tim Editor,

PENGANTAR EDITOR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas ijin-Nya, kami dapat merampungkan penyusunan prosiding Seminar Nasional dengan tema **“Penguatan Komitmen Komunitas Akademik dalam Memperkokoh Jatidiri PKn”**, yang diselenggarakan di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia pada tanggal 4 April 2015.

Konten artikel dalam prosiding ini merujuk kepada sub tema seminar, yakni : (1) Tantangan PKn sebagai Sistem Pengetahuan Terintegrasi: Analisis Filosofik; (2) Penguatan Jatidiri PKn melalui Pengembangan Kultur Akademik; (3) Kebutuhan akan *Capacity Building* Komunitas Akademik PKn di tengah penetrasi Globalisasi; (4) Praxis Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah: Belajar dari Pengalaman; (5) Revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Warganegara Sadar Konstitusi.

Gagasan yang disampaikan oleh para penulis sudah barang tentu sangat beragam sesuai dengan latar belakang keilmuan dan pengalaman masing-masing, namun masih dalam konteks sub tema di atas. Keragaman perspektif tersebut, merupakan hal yang sangat wajar, mengingat kajian pendidikan kewarganegaraan (*civic/citizenship education*) tidak bersifat monodisiplin, melainkan bersifat multi, intra dan transdisiplin. Justeru dengan kajian yang bersifat multi dan transdisiplin tersebut, memungkinkan kajian pendidikan kewarganegaraan sangat menarik dan menantang, tidak saja bagi komunitas akademik PKn, juga bagi para pemerhati atau penggiat yang memiliki *concern* yang tinggi terhadap kajian PKn.

Terlebih dalam konteks kekinian, berbagai fenomena yang muncul, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kajian PKn, menuntut respon kritis (*critical responses*) dari komunitas akademik PKn, yang berorientasi pada alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Pendidikan Kewarganegaraan, baik dalam dimensi kajian akademik, dimensi kurikuler, maupun dimensi gerakan sosio-kultural, memiliki peran strategis dalam memecahkan beragam persoalan yang muncul di masyarakat yang terkait dengan masalah-masalah kemasyarakatan kekinian (*current civic affairs*).

Pada kesempatan ini, tim editor menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama secara sinergis, sehingga memungkinkan prosiding ini dapat diterbitkan dengan baik. Tak lupa, dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan permohonan maaf andaikata dalam prosiding ini masih terdapat hal-hal yang dirasa belum memadai atau sesuai dengan harapan.

Untuk itu, demi penyempurnaan prosiding ini, kami sangat berharap sumbang saran atau masukan yang konstruktif dari para pembaca yang budiman. Kami sangat berbesar hati untuk menerima saran tersebut.

Selamat membaca

Bandung, 30 Maret 2015

Tim Editor,

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



Saya menyambut gembira terbitnya Prosiding Seminar Nasional **"Penguatan Komitmen Komunitas Akademik dalam Memperkokoh Jatidiri PKn"** yang diselenggarakan bersama oleh Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI) dan Departemen Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) FPIPS UPI, sebagai langkah konkrit dalam mengembangkan kultur akademik yang konstruktif.

Kultur akademik yang baik dan mendukung, harus kita yakini akan sangat mendorong perwujudan suasana kampus yang berwibawa, di mata sivitas akademiknya, dan terlebih di mata masyarakat luas. Sudah barang tentu, untuk mewujudkan kultur akademik tersebut, tidaklah berpangku tangan pada pihak tertentu saja, melainkan harus didukung oleh para pihak (*stakeholders*) secara konstruktif.

Keberadaan asosiasi profesi, memiliki peran yang cukup strategis tidak hanya dalam pengembangan keilmuan, melainkan dalam hal mengeratkan hubungan diantara anggotanya, guna menghantarkan organisasi profesi tersebut menjadi organisasi yang sehat dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Hal ini mutlak dimiliki, agar suatu organisasi profesi mampu memberikan kontribusi bernilainya bagi pembangunan masyarakat.

Seperti halnya AP3KnI ini, saya yakin dan percaya, dengan sumber daya pengurus dan anggotanya yang memiliki komitmen yang tinggi dalam memajukan organisasi, akan mampu menjadikan AP3KnI sebagai organisasi profesi yang benar-benar profesional, dan selalu terdepan dalam mengambil langkah-langkah nyata untuk memberikan solusi atas berbagai permasalahan pendidikan khususnya, dan berbagai permasalahan bangsa yang semakin kompleks dan pelik.

Atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh jajaran pengurus dan anggota AP3KnI baik pusat maupun wilayah/daerah, yang akan menyelenggarakan rapat kerja nasional (rakernas) tahun ini di kampus UPI, diiringi dengan harapan, semoga menghasilkan berbagai agenda kegiatan yang berorientasi nyata dalam pembangunan pendidikan di Indonesia.

Bandung, 30 Maret 2015

Rektor,

Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd

SAMBUTAN DEKAN FPIPS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



Salah satu tradisi akademik yang harus terus menerus dikembangkan adalah publikasi karya-karya ilmiah dari para akademisi, baik berupa hasil hasil penelitian maupun analisis wacana secara kritis atas berbagai persoalan yang mengemuka di masyarakat saat ini. Dengan begitu, para akademisi mampu mengaktualisasikan komitmen akademisnya dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab, dalam memecahkan berbagai problema masyarakat kekinian yang kian kompleks.

Apa yang dilakukan oleh AP3KnI dengan menerbitkan prosiding seminar nasional yang bertema **“Penguatan Komitmen Komunitas Akademik dalam Memperkokoh Jatidiri PKn”**, merupakan langkah tepat yang patut diapresiasi, sebagai ikhtiar untuk mengembangkan tradisi akademik yang baik. Karenanya, pada kesempatan ini, saya menyampaikan selamat atas penyelenggaraan seminar dan rakernas AP3KnI tahun 2015 yang ditandai dengan penerbitan prosiding ini, yang saya kira, substansi dan orientasinya akan tertuju pada pengembangan pendidikan kewarganegaraan (PKn) guna mewujudkan warganegara yang cerdas dan baik, sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Gagasan yang dituangkan dalam prosiding ini, bukan merupakan *ijtihad* akhir, melainkan justeru sebagai permulaan bagi para akademisi untuk secara terus menerus berkiprah dalam merespon berbagai permasalahan kemasyarakatan (*civic affairs*) saat ini. Dengan cara pandang seperti ini, saya amat yakin, para komunitas akademik PKn akan mampu mengejawantahkan komitmennya yang mendasar yakni keterpanggilan untuk senantiasa menemukan serta memecahkan berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

Betapapun sederhananya, penerbitan prosiding seminar ini adalah bagian penting dari proses pewarisan ilmu pengetahuan kepada para generasi penerus bangsa Indonesia. Menularkan tradisi akademik kepada generasi penerus bangsa merupakan sesuatu yang sangat mulia untuk mewujudkan generasi masa depan yang lebih baik. Dengan begitu, kita sudah berusaha untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang memiliki kompetensi yang mumpuni baik dalam pengetahuan dan keterampilan, maupun dalam sikap atau disposisi kepribadian yang berkarakter.

Bandung, 30 Maret 2015
Dekan FPIPS UPI,

Prof. Dr. Karim Suryadi, M.Si

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



Saya menyambut gembira terbitnya Prosiding Seminar Nasional **“Penguatan Komitmen Komunitas Akademik dalam Memperkokoh Jatidiri PKn”** yang diselenggarakan bersama oleh Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI) dan Departemen Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) FPIPS UPI, sebagai langkah konkrit dalam mengembangkan kultur akademik yang konstruktif.

Kultur akademik yang baik dan mendukung, harus kita yakini akan sangat mendorong perwujudan suasana kampus yang berwibawa, di mata sivitas akademiknya, dan terlebih di mata masyarakat luas. Sudah barang tentu, untuk mewujudkan kultur akademik tersebut, tidaklah berpangku tangan pada pihak tertentu saja, melainkan harus didukung oleh para pihak (*stakeholders*) secara konstruktif.

Keberadaan asosiasi profesi, memiliki peran yang cukup strategis tidak hanya dalam pengembangan keilmuan, melainkan dalam hal mengeratkan hubungan diantara anggotanya, guna menghantarkan organisasi profesi tersebut menjadi organisasi yang sehat dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Hal ini mutlak dimiliki, agar suatu organisasi profesi mampu memberikan kontribusi bernilainya bagi pembangunan masyarakat.

Seperti halnya AP3KnI ini, saya yakin dan percaya, dengan sumber daya pengurus dan anggotanya yang memiliki komitmen yang tinggi dalam memajukan organisasi, akan mampu menjadikan AP3KnI sebagai organisasi profesi yang benar-benar profesional, dan selalu terdepan dalam mengambil langkah-langkah nyata untuk memberikan solusi atas berbagai permasalahan pendidikan khususnya, dan berbagai permasalahan bangsa yang semakin kompleks dan pelik.

Atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh jajaran pengurus dan anggota AP3KnI baik pusat maupun wilayah/daerah, yang akan menyelenggarakan rapat kerja nasional (rakernas) tahun ini di kampus UPI, diiringi dengan harapan, semoga menghasilkan berbagai agenda kegiatan yang berorientasi nyata dalam pembangunan pendidikan di Indonesia.

Bandung, 30 Maret 2015

Rektor,

Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd

SAMBUTAN DEKAN FPIPS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



Salah satu tradisi akademik yang harus terus menerus dikembangkan adalah publikasi karya-karya ilmiah dari para akademisi, baik berupa hasil hasil penelitian maupun analisis wacana secara kritis atas berbagai persoalan yang mengemuka di masyarakat saat ini. Dengan begitu, para akademisi mampu mengaktualisasikan komitmen akademisnya dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab, dalam memecahkan berbagai problema masyarakat kekinian yang kian kompleks.

Apa yang dilakukan oleh AP3KnI dengan menerbitkan prosiding seminar nasional yang bertema **“Penguatan Komitmen Komunitas Akademik dalam Memperkokoh Jatidiri PKn”**, merupakan langkah tepat yang patut diapresiasi, sebagai ikhtiar untuk mengembangkan tradisi akademik yang baik. Karenanya, pada kesempatan ini, saya menyampaikan selamat atas penyelenggaraan seminar dan rakernas AP3KnI tahun 2015 yang ditandai dengan penerbitan prosiding ini, yang saya kira, substansi dan orientasinya akan tertuju pada pengembangan pendidikan kewarganegaraan (PKn) guna mewujudkan warganegara yang cerdas dan baik, sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Gagasan yang dituangkan dalam prosiding ini, bukan merupakan *ijtihad* akhir, melainkan justeru sebagai permulaan bagi para akademisi untuk secara terus menerus berkiprah dalam merespon berbagai permasalahan kemasyarakatan (*civic affairs*) saat ini. Dengan cara pandang seperti ini, saya amat yakin, para komunitas akademik PKn akan mampu mengejawantahkan komitmennya yang mendasar yakni keterpanggilan untuk senantiasa menemukan serta memecahkan berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

Betapapun sederhananya, penerbitan prosiding seminar ini adalah bagian penting dari proses pewarisan ilmu pengetahuan kepada para generasi penerus bangsa Indonesia. Menularkan tradisi akademik kepada generasi penerus bangsa merupakan sesuatu yang sangat mulia untuk mewujudkan generasi masa depan yang lebih baik. Dengan begitu, kita sudah berusaha untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang memiliki kompetensi yang mumpuni baik dalam pengetahuan dan keterampilan, maupun dalam sikap atau disposisi kepribadian yang berkarakter.

Bandung, 30 Maret 2015
Dekan FPIPS UPI,

Prof. Dr. Karim Suryadi, M.Si

SAMBUTAN KETUA UMUM BADAN PENGURUS PUSAT (BPP) AP3KNI



Tidak terasa, dengan berbagai dinamika yang kita lalui, saat ini kita sudah memasuki tahun kerja 2015. Ini berarti AP3Kni sudah berusia lima tahun sejak dideklarasikan di Bandung pada Desember 2010 silam. Saya patut menyambut gembira dengan telah terbentuknya secara resmi 11 (sebelas) kepengurusan AP3Kni wilayah dan terus mendorong pembentukan di provinsi lainnya.

Dari aspek kegiatan, AP3Kni telah menyelenggarakan berbagai pertemuan antara lain Seminar dan Rakernas di Bandung pada Desember 2013, kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan Semiloka di Solo pada Pebruari 2014, dan berlanjut pada kegiatan Seminar dan Pengukuhan Pengurus Wilayah AP3Kni Sulawesi Utara di Manado pada Oktober 2014 yang lalu. Di samping kegiatan tersebut, masing-masing pengurus AP3Kni wilayah yang telah terbentuk, juga telah melaksanakan berbagai kegiatan baik seminar maupun lokakarya di daerah masing-masing, dengan spirit yang sama yakni upaya dalam rangka pengembangan pendidikan kewarganegaraan.

Atas nama Pengurus Pusat, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas penyelenggaraan berbagai kegiatan tersebut, baik yang diinisiasi oleh pengurus pusat maupun pengurus wilayah/daerah di seluruh Indonesia. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan menunjukkan wujud nyata AP3Kni untuk memberikan kontribusi optimalnya dalam rangka mengajukan alternatif pemecahan atas berbagai permasalahan bangsa yang tengah di hadapi saat ini.

Mengawali tahun 2015 ini, AP3Kni kembali menggelar kegiatan seminar dan rakernas sebagai bagian dari program kerja AP3Kni. Rakernas diselenggarakan untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi secara matang dalam merancang dan melaksanakan kegiatan ke masa depan. Sementara itu, seminar diselenggarakan sebagai wahana strategis untuk berbagi pandangan dan pengalaman dalam konteks praksis pendidikan kewarganegaraan, juga memperkuat landasan keilmuan PKn sebagai disiplin ilmu yang terintegrasi dalam merespon perkembangan jaman atau globalisasi yang kian penetratif dalam berbagai dimensi kehidupan.

Prosiding yang saat ini ada di hadapan para pembaca yang budiman merupakan bentuk nyata kontribusi dari para pemateri dan peserta seminar nasional dalam menyumbangkan gagasan cerdas dan kreatif, yang berorientasi pada upaya pengembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

Selamat membaca!

Bandung, 30 Maret 2015
Ketua Umum BPP AP3Kni,

Prof. Dr. Udin S. Winataputra, M.A

**SAMBUTAN KETUA PELAKSANA
SEMINAR DAN RAKERNAS AP3KNI TAHUN 2015**



Pada tanggal 4 April 2015, bertempat di Auditorium Gedung M. Nu'man Somantri FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, kembali berkumpul sejumlah akademisi, para guru dari berbagai jenjang, dan para pemerhati PKn yang *concern* terhadap pengembangan pendidikan kewarganegaraan untuk membicarakan tema seminar yang sangat menantang yakni **“Penguatan Komitmen Komunitas Akademik dalam Memperkokoh Jatidiri PKn”**.

Saya sangat senang, keinginan panitia untuk menghimpun gagasan para peserta seminar dalam bentuk prosiding, direspon secara luar biasa, dimana terkumpul lebih dari 75 artikel, yang tentu saja dari sisi konten sangat relevan dengan tema sentral seminar. Saya memaknai tingginya respon tersebut sebagai *positive trend* untuk membangun kesadaran (*consciousness*), kemauan (*willingness*) serta tanggapan (*respon*) atas berbagai fenomena empirik yang menggejala dalam kehidupan saat ini.

Penyusunan prosiding seminar ini, didorong oleh *academic spirit* untuk mengembangkan budaya menulis dan budaya bertukar pikiran dan pengalaman terbaik (*best practice*) secara konstruktif dari para pihak yang memiliki perhatian terhadap PKn, melalui gagasan atau ide yang dikonstruksi dalam artikel ilmiah. Tradisi akademik seperti inilah yang menurut saya sangat mendukung ke arah pengembangan *academic culture* yang baik.

Atas nama panitia pelaksana, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada berbagai pihak, atas kerjasama yang baik, memungkinkan prosiding seminar ini dapat dirampungkan dengan baik, kendatipun dalam aspek-aspek tertentu, masih terdapat hal yang harus disempurnakan lagi. Sudah barang tentu, hal ini menjadi *positive challenge* bagi kami untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan untuk masa-masa yang akan datang.

Kepada para pembaca yang budiman, saya sampaikan selamat membaca!

Bandung, 30 Maret 2015
Ketua Panitia,

Syaifullah, M.Si

DAFTAR ISI

Pengantar Editor	iii
Sambutan Rektor	v
Sambutan Dekan FPIPS	vi
Sambutan Ketua Departemen PKN FPIPS	vii
Sambutan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) AP3KNI	viii
Sambutan Ketua Pelaksana Seminar dan Rakernas AP3KNI Tahun 2015	ix
1. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PKN) UNTUK GENERASI EMAS INDONESIA: REKONSTRUKSI CAPAIAN PEMBELAJARAN Udin S. Winataputra, Riza Alrahman	1
2. PERANAN STRATEGIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NASIONAL DALAM MEMBANGUN NEGARA BANGSA INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA Soedijarto	24
3. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MENYIAPKAN GENERASI EMAS INDONESIA Sjamsi Pasandaran	36
4. PENGEMBANGAN <i>CIVIC INTELLIGENCE</i> BERBASIS KEGIATAN EKSTRA KURIKULER DI SEKOLAH DASAR Masrukhi dan Tommi Yuniawan	52
5. REPOSISI PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA Dasim Budimansyah	66
6. PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI PKN SEBAGAI DISIPLIN ILMU TERINTEGRASI BERBASIS KKN Sapriya	76
7. DEMOKRASI DALAM PERSIMPANGAN MAKNA Cecep Darmawan	95
8. PEMBERDAYAAN GENERASI MUDA SEBAGAI DASAR FILOSOFIS DARI KETERLIBATAN WARGANEGARA (<i>CIVIC ENGAGEMENT</i>) : TINJAUAN TENTANG PROGRAM MAHASISWA WIRAUSAHA (PMW) Syaifullah	102
9. MANAJEMEN PEMBELAJARAN DALAM MEMPERKUAT IMPLEMENTASI KURIKULUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN), Apeles Lexi Lonto	121

10. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI UNTUK PENGEMBANGAN KESADARAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN <i>SOFT SKILLS</i> MAHASISWA Asep Mahpudz.....	130
11. REVITALISASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MEMBANGUN WARGANEGARA SADAR KONSTITUSI Atmawarni	140
12. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : UPAYA UNTUK MEMBANGUN KARAKTER BANGSA DI LINGKUNGAN MAHASISWA Aziz Taufik Hirzi.....	146
13. PERAN PKN DALAM MEMBANGUN KESADARAN AKAN PENTINGNYA KESEIMBANGAN ANTARA PANCASILA SSBAGAI “RUH” DAN NEGARA INDONESIA SEBAGAI “BADAN” Bartolomeus Samho.....	152
14. STUDI KORELASI ANTARA PEMANFAATAN SUMBER BELAJAR DENGAN MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA STKIP SINTANG Dessy Triana Relita.....	165
15. MENGGAGAS PENGUATAN KAJIAN AKHLAK KEWARGAAN (<i>CIVIC VIRTUE</i>) PERSPEKTIF ISLAM DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL Dikdik Baehaqi Arif.....	175
16. MAPPING KESADARAN HUKUM MAHASISWA DI LUAR KAMPUS (Studi Kasus Perilaku Mahasiswa di Universitas X) M. Yahya Arwiyah.....	186
17. PENGUASAAN KONSEP IPS DALAM UPAYA PEMBERIAN PEMBEKALAN PEMECAHAN MASALAH SOSIAL PADA SISWA SEKOLAH DASAR Eliana Yunitha Seran.....	190
8. TRANSFORMASI BUDAYA LOKAL MASYARAKAT SIMEULUE (<i>SMONG</i>) DALAM PENGUATAN MATERI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) Hasbi Ali.....	201
9. REVITALISASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MEMBANGUN WARGANEGARA SADAR KONSTITUSI Hasan Suryono.....	211
0. PENDIDIKAN DEMOKRASI SEBAGAI PENGUATAN JATI DIRI PKN MELALUI PENGEMBANGAN KULTUR AKADEMIK Indriyana Dwi Mustikarini	219
1. PIAGAM MADINAH DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 M: Sulthon	226

22. AKTUALISASI PENDIDIKAN KETELADANAN DALAM MEREDAM IDEOLOGI RADIKAL DI INDONESIA Maimun	242
23. SEMANGAT KEBANGSAAN PADA MAHASISWA ASAL WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA Mardawani.....	251
24. BERANI MENGAJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBAGI PERAN DENGAN MEDIA PEMBELAJARAN Miming Karmilah	261
25. KEMAMPUAN SISWA DALAM MANAJEMEN MITIGASI BENCANA SEBAGAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI <i>CIVIC SKILL</i> WARGA NEGARA Muhammad Mona Adha	276
26. KEPEMIMPINAN DALAM INTEGRITAS PELEMBAGAAN DAN PEMBUDAYAAN PANCASILA Nana Setialaksana.....	294
27. PENEGUHAN JATI DIRI BANGSA DAN KARAKTER KE INDONESIAAN MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI ERA GLOBALISASI Nurul Zuriah	301
28. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI ERA GLOBAL Runik Machfiroh	312
29. OPTIMALISASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI Rusli Yusuf	318
30. KONTRIBUSI KEGIATAN EKSTRAKULIKULER PADA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Sabarudin.....	328
31. PENGARUH KOMPETENSI PROFESIONAL GURU TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN POKOK BAHASAN HAK ASASI MANUSIA DI KELAS VII PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Sapto Purnomo	336
32. REVITALISASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA MENINGKATKAN KESADARAN BERKONSTITUSI WARGA NEGARA INDONESIA Siska Diana Sari	341

33. PENGUATAN JATIDIRI PKN MELALUI PENGEMBANGAN KULTUR AKADEMIK Sri Kunarsih.....	350
34. MENUJU MASYARAKAT DEMOKRATIS MELALUI PENDIDIKAN HUKUM YANG HOLISTIK Sumaryati.....	354
35. SUBSTANSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN) KOMUNITAS BAGI APARAT PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT DESA MENGHADAPI ARUS MODERNISASI POLITIK Supriyadi.....	362
36. DESAIN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS <i>GREEN CONSTITUTION</i> DALAM MEMBANGUN KESADARAN BERKONSTITUSI Susan Fitriasisari	376
37. URGENSI PENDIDIKAN POLITIK DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI BERKEADABAN Triwahyuningsih.....	384
38. PENERAPAN PEMBELAJARAN PERADILAN SEMU UNTUK MEMAHAMI KONSEP HUKUM DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) Winarno	391
39. PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN GUNA MENYADARKAN WARGANEGARA AKAN HAK DAN KEWAJIBAN Yunisca Nurmalisa.....	396
40. KAJIAN MAKNA NILAI HISTORIS DAN BUDAYA DALAM <i>NATIONAL COSTUME</i> DI AJANG INTERNASIONAL SEBAGAI JATI DIRI BANGSA Agustinus Tampubolon.....	403
41. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: ANTARA CITA DAN REALITA Triyanto	417
42. UPAYA MEMBANGUN JATI DIRI BANGSA GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH DALAM MEMBINA BUDAYA DISIPLIN UNTUK MEWUJUDKAN KAREKTER BANGSA Dede Iswandi.....	423
43. REAKTUALISASI EMPAT KONSENSUS KEBANGSAAN INDONESIA UNTUK MEMBENTUK WARGA NEGARA YANG CERDAS DAN BAIK (<i>SMART AND GOOD CITIZENS</i>) Efi Miftah Faridli.....	430

44.	PENGEMBANGAN EKONOMI KEWARGANEGARAAN (<i>ECONOMIC CIVIC</i>) PADA MASYARAKAT DEMOKRATIS Epin Saepudin.....	440
45.	MEMBUDAYAKAN KESADARAN BERKONSTITUSI MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Pebriyenni.....	453
(46)	PENGUATAN JATIDIRI PKn MELALUI PENDIDIKAN KAREKTER SEBAGAI BENTUK PARTISIPASI PEMBANGUNAN WARGA NEGARA DALAM MENGHADAPI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) TAHUN 2015 Riyan Yudistira	463
47.	REPOSISI HAK ASASI MANUSIA DALAM KAJIAN KURIKULER PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA Samsuri	478
48.	PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN ANTIKORUPSI UNTUK MENDUKUNG KARAKTER KEJUJURAN SISWA DI SEKOLAH MELALUI PKn Shilmy Purnama	485
49.	PENGUATAN PENGUASAAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN CALON GURU PPKn MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS <i>BLENDED</i> <i>LEARNING</i> DI PERGURUAN TINGGI Siti Awalayah.....	492
50.	MENANAMKAN KEBAIKATAN MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Sylvester Kanisius	501
51.	REVOLUSI MENTAL MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Wildan Nurul Fajar	509
52.	KUALITAS KINERJA GURU PKN SEBAGAI UPAYA PENGOPTIMALISASI PROSES DAN HASIL BELAJAR Julien Biringan.....	517
53.	MEMAKNAI LINGUISTIC TURN DAN NARRATIVE TURN DALAM PEMIKIRAN POSTMODERNIS Ana Andriani	530
54.	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TRANSFORMATIF UNTUK MENGEMBANGKAN WAWASAN GLOBAL PESERTA DIDIK DI SEKOLAH Mukhamad Murdiono	539
55.	UPAYA MEMBANGUN KARAKTER BANGSA YANG BERPANCASILA DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA Marintan Lasrida Sitorus	551

56. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA UNTUK MENJAWAB TANTANGAN KEKINIAN DI INDONESIA Nurhadianto	568
57. TANTANGAN PKn SEBAGAI SISTEM PENGETAHUAN TERINTEGRASI Nurharini.....	579
58. KERANGKA PEMIKIRAN PEMBELAJARAN HUKUM PIDANA DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Petrus Irianto	591
59. URGENSI PENILAIAN RANAH AFEKTIF DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Rohani	599
60. RELEVANSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DENGAN PENDIDIKAN DAMAI DALAM MEMBANGUN WARGANEGARA DEMOKRATIS DI SEKOLAH Candra Cuga	610
61. PANDANGAN FILSAFAT ESSENSIALISME DALAM MEMPERKOKOH PKn SEBAGAI <i>INTEGRATED SYSTEM OF KNOWLEDGE</i> Eli Karlani	622
62. PRAKSIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH : BELAJAR DARI PENGALAMAN Leni Anggraeni	634
63. KOSMOPOLITANISME APAKAH ANCAMAN ATAU TANTANGAN BAGI PENGEMBANGAN NASIONALISME INDONESIA? Lili Halimah	645
64. MEMOTRET CIVIC ENGAGEMENT DI INDONESIA Sunarto Amus	656
65. EKSISTENSI PKN DALAM KEMANDIRIAN PENGELOLAAN INSTITUSI ADALAH SEBUAH KENISCAYAAN Susena.....	669
66. PERAN AP3KNI SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS ETNOPEDAGOGIK UNTUK MEMBANGUN GENERASI EMAS KEBANGKITAN NASIONAL MODERN Iim Siti Masyitoh.....	674
67. PENGUATAN JATIDIRI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MELALUI PENUMBUHAN BUDAYA POLITIK PARTISIPAN Deny Setiawan.....	684

68. KONSTRUK KURIKULER PENDIDIKAN AFEKSI SEBAGAI PEMBENTUK KARAKTER DALAM PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARA	
Nani Nur'aeni.....	696
69. PERANAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PEMBINAAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK	
Dwi Iman Muthaqin	711
70. METODE PEMBELAJARAN KLIK BERBASIS <i>MIND MAP</i> DALAM MEMANFAATKAN CARA KERJA OTAK SEBAGAI MESIN ASOSIASI UNTUK MENGATASI KESULITAN BELAJAR MAHASISWA PADA MATA KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM	
Dadang Sundawa	720
71. REVITALISASI GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS: MENJAWAB TANTANGAN BARU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) PADA LEVEL PUBLIK	
Sri Wahyuni Tanshzil	735
72. <i>CITIZEN POLITICS</i> (POLITIK KEWARGANEGARAAN) SEBAGAI PENGEMBANGAN ILMU DALAM KAJIAN PKn: TANTANGAN ANALISIS FILOSOFIK	
Halking	743
73. ESENSI SOSIALISASI KEBIJAKAN PELAYANAN PAJAK SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN WARGA NEGARA DALAM MEMBAYAR PAJAK DI PROVINSI JAWA BARA	
Prayoga Bestari.....	757
74. REAKTUALISASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM MEMBANGUN KARAKTER MAHASISWA MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI	
Rini Irianti Sundry	767
75. PENGUATAN JATI DIRI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGAKTUALISASIKAN MORALITAS PENEGAKAN HUKUM UNTUK MEMBENTUK <i>GOOD CITIZEN</i>	
Triana Rejekiningsih.....	775
76. PROSES PENGUATAN KARAKTER MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MELALUI KEGIATAN EKSTRA KURIKULER	
Ruslan	789
77. MEMAKNAI HAKIKAT DAN PELAKSANAAN KEDAULATAN RAKYAT INDONESIA	
Yuyus Kardiman	798

78. PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KONTEKSTUAL BERBASIS <i>LIVING VALUES EDUCATION</i> : SEBUAH PENGALAMAN PRAKSIS Kokom Komalasari.....	811
79. URGENSI PENGUATAN PKN SEBAGAI PROGRAM SOSIAL-KULTURAL KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBINA KARAKTER SISWA Rahmat.....	824
80. ANTIKORUPSI SEBAGAI SUMBER MATERI DAN NILAI DALAM PEMBELAJARAN PPKn DI SEKOLAH Harmanto dan Totok Suyanto	839
81. PENGUATAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI STRATEGI REVITALISASAI NILAI-NILAI PANCASILA DAN UNTUK MENINGKATKAN KARAKTER DAN JATI DIRI BANGSA, Wahyu Widodo	849
82. STUDI PENELUSURAN ALUMNI PROGRAM STUDI D3 dan S1 PPKn PIPS- FKIP UNIVERSITAS TERBUKA Syaiful Mikdar, Sriyono, Sri Sumiyati	861
83. PENYELARASAN KURIKULUM S1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DENGAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNi) Sriyono, Syaeful Mikdar dan Yos Sudarso	877
84. PERAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBINA SIKAP DEMOKRATIS SISWA SMP MUHAMMADIYAH 1 PURWOKERTO Elly Hasan Sadeli	900
85. MEMBANGUN WARGA NEGARA SADAR KONSTITUSI MELALUI REVITALISASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Sri Suneki	907
86. PENTINGNYA PEMAHAMAN KE- INDONESIAAN BAGI WARGA BANGSA INDONESIA DI ERA GLOBALISASI (KASUS KE INDONESIAAN DI PAPUA) Bernarda Meteray	913
87. INKLUSI DEMOKRASI TERHADAP MINORITAS (Tantangan Indonesia dalam Membangun Politik Inklusi Demokratis) Halili.....	923

sesuai kebutuhan belajar seperti bahan pembelajaran, alat pembelajaran serta teknik pembelajaran yang tepat guna sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar mahasiswa semakin maksimal. Melalui pemanfaatan sumber belajar yang kreatif, inovatif akan memberikan dampak positif bagi perkembangan belajar mahasiswa yang ditandai oleh maksimalnya motivasi belajar mahasiswa itu sendiri.

2. Bagi pihak kampus, kiranya dapat menyediakan sumber belajar yang lain seperti jaringan internet yang lebih baik dari yang sebelumnya dan penambahan ruang khusus untuk para mahasiswa mengakses internet dalam rangka mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen.
3. Bagi mahasiswa, bahwa sumber belajar penting untuk dikembangkan dan dimanfaatkan seefektif mungkin berkaitan dengan proses belajar mengajar. Mahasiswa diharapkan memiliki sikap terbuka terhadap perkembangan zaman dan mampu mengaktualisasikan sumber belajar yang ada di kampus sebagai modal dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik.

Daftar Rujukan

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hamalik, Oemar. 2009. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Rohani, Ahmad. 2004. *Pengelolaan Pengajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Seels dan Richey. 1994. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru.
- Sudjana. 2005. *Metode Statistik*, Bandung : PT. Tarsito.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*. Bandung: Alfabeta
- Susilo. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sardiman. AM. 2006. *Interaksi dan Motivasi Brelajar Mengajar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutrisno Hadi. 2004. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi offset.
- Sutikno, M. Sobry. 2009. *Belajar dan Pembelajaran “Upaya Kreatif dalam Mewujudkan Pembelajaran yang Berhasil”*. Bandung: Prospect.
- Sumiati dan Asra. 2011. *Metode Pembelajaran*. Bandung : CV Wacana Prima.

MENGGAGAS PENGUATAN KAJIAN AKHLAK KEWARGAAN (*CIVIC VIRTUE*) PERSPEKTIF ISLAM DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Oleh,
Dikdik Baehaqi Arif

Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam mengembangkan budaya kewargaan (*civic culture*) yang diperlukan dalam rangka membangun sistem politik demokrasi. Sebagai program kurikuler pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berorientasi untuk mempersiapkan warga negara muda agar memiliki kemampuan untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat politik. Pada masyarakat Indonesia yang multikultural, budaya kewargaan perlu dibangun di atas fondasi akhlak kewargaan, yang meliputi karakter dan komitmen kewargaan berdasarkan pada nilai Pancasila. Tulisan ini membahas gagasan perlunya penguatan kajian akhlak kewargaan perspektif Islam, terutama pada komunitas PKn di lembaga pendidikan (berbasis) Islam untuk memperkuat peran warga negara dalam masyarakat multikultural Indonesia.

Kata Kunci: Budaya Kewargaan, Akhlak Kewargaan, Islam, Masyarakat Multikultural, Pendidikan Kewarganegaraan

Pendahuluan

Diantara karakteristik masyarakat Indonesia yang multikultural adalah hadirnya lembaga penyelenggara pendidikan termasuk di dalamnya masukan (*input*) siswa dalam lingkup pendidikan itu yang sangat beragam. Hampir di setiap lembaga pendidikan, baik dari mulai tingkat dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi, dapat kita temui peserta didik yang memiliki karakteristik yang berbeda. Kenyataan itu dilatarbelakangi oleh perbedaan kelompok suku bangsa, ras, budaya, agama, gender, maupun bahasa asal mereka. Bukan saja di lingkungan sekolah, mereka juga akan berhadapan dengan berbagai perbedaan lainnya di lingkungan sosial atau budaya mereka sehari-hari. Inilah kekayaan bangsa, sekaligus juga tantangan bagi para pendidik dalam merancang program pembelajaran yang mengakomodir keberagaman itu dengan tetap tidak melupakan fungsi dan tujuan pendidikan.

Menghadapi kondisi kemajemukan itu, para pendidik perlu berpikir ulang tentang bagaimana menjalankan peran dan fungsinya dalam proses pembelajaran di kelas yang siswanya berbeda dalam suku bangsa, ras, budaya, agama, gender, maupun bahasa asal mereka. Sebuah penelitian yang dilakukan tim The LIFE Center dan Center for Multicultural Education di University of Washington, Seattle USA, merumuskan

⁵⁶Sebagian naskah ini pernah disampaikan dalam Semiloka Nasional Pendidikan yang diselenggarakan oleh Program Studi PPKn STKIP Garut, di Pendopo Kabupaten Garut, Sabtu, 17 Mei 2014

Dosen pada Program Studi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Jl. Pramuka No. 42 Sidikan Umbulharjo Yogyakarta 55161. Telp. 081394036944, e-mail: dikdikbaehaqi@ppkn.uad.ac.id

pentingnya pemahaman kembali prinsip-prinsip pembelajaran (*learning princiles*) untuk siswa yang multikultural. Laporan itu mengidentifikasi empat prinsip pembelajaran kontemporer yang perlu dipahami oleh penyelenggara pendidikan.

1. *Learning is situated in broad socio-economic and historical contexts and is mediated by local cultural practices and perspectives.*
2. *Learning takes place not only in school but also in the multiple contexts and valued practices of everyday lives across the life span.*
3. *All learners need multiple sources of support from a variety of institutions to promote their personal and intellectual development.*
4. *Learning is facilitated when learners are encouraged to use their home and community language resources as a basis for expanding their linguistic repertoires.* (The LIFE Center and Center for Multicultural Education, 2007)

Keempat prinsip pembelajaran di atas terasa tepat dipraktikkan dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia. Para siswa perlu diajak untuk memahami lingkungan belajar yang cukup luas, dimediasi oleh praktik dan perspektif budaya lokal – budaya yang merupakan hasil cipta, karsa, dan karya genuine manusia Indonesia. Demikian pula bahwa pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam ruang kelas sekolah yang terbatas, tetapi juga dalam kontes dan nilai yang banyak di luar sekolah. Hal demikian karena setiap pembelajar membutuhkan sumber untuk pengembangan diri dan intelektual mereka.

Proses pembelajaran diharapkan mampu memfasilitasi peserta didik dari berbagai latar belakang untuk dapat mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang mampu menghargai, menghormati dan bekerjasama dengan orang/kelompok dari berbagai latar belakang; berperilaku mengutamakan kepentingan umum; mempromosikan hak individu, keanekaragaman dan kesetaraan; menjunjung kebenaran, cinta tanah air; tidak larut dalam pengkultusan tokoh, kelompok dan partai, ras, etnik, bahasa dan agama/keyakinan; mau mengakui kekurangan dan kesalahan, mau belajar dari kekurangan dan kesalahan, tidak mudah dihegemoni dan mudah mencari kambing hitam atau memanipulasi sesuatu yang merugikan orang lain, tidak mudah berprasangka buruk kepada individu atau kelompok lain; dan kritis sesuai konteks ruang dan waktu (Arif, 2008). Nilai budaya itu diperlukan untuk membangun sistem politik demokrasi konstitusional, yang ditandai oleh adanya kebebasan (berpendapat, berkelompok, berpartisipasi), menghormati orang/kelompok lain, kesetaraan, kerjasama, persaingan, dan kepercayaan (Chamim, 2003).

Dalam pada itu, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) di sekolah memerankan peran strategis dalam memfasilitasi siswa agar mampu mengembangkan nilai dan sikap yang menghargai perbedaan, baik di lingkungan sekolah, maupun pada lingkungan luar sekolah yang lebih luas untuk terwujudnya kehidupan demokratis berkeadaban berdasarkan Pancasila. Upaya tersebut, tidaklah hadir dengan sendirinya, tetapi mesti dirancang dan dikembangkan dengan baik agar tidak terjebak pada formalitas belaka. Siswa tidak hanya difasilitasi untuk memahami keberagaman, tetapi siswa juga harus memiliki akhlak kewargaan (*civic virtue*) demi terbentuknya budaya kewargaan (*civic culture*) berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Pembahasan

Perspektif Budaya Kewargaan

Pemahaman tentang budaya kewargaan (*civic culture*) tidak bisa dilepaskan dari studi-studi tentang demokrasi. Konsep ini diperkenalkan pertama kali oleh Gabriel Almond dan Sydney Verba (1963). *Civic culture* dipahami sebagai orientasi psikologis terhadap objek sosial, atau sikap terhadap sistem politik dan terhadap diri sebagai seorang aktor politik (Mujani, 2007). Orientasi ini termasuk pengetahuan atau kepercayaan, perasaan atau afeksi, dan evaluasi atau penilaian terhadap sistem politik secara umum, input dan output politik, dan peran seseorang dalam sistem politik. Diyakini bahwa variasi di dalam orientasi dan sikap ini mempengaruhi partisipasi dan dan penerimaan terhadap sistem demokrasi, yang pada gilirannya mempengaruhi stabilitas demokrasi (Mujani, 2007).

Dalam pembahasannya tentang orientasi politik itu, Almond dan Verba meyakini bahwa ada tiga jenis budaya politik: budaya politik parokial (*parochial*), budaya politik subjek, dan budaya politik partisipan. Budaya politik parokial ditandai oleh tidak terdapatnya peranan politik yang bersifat khas dan berdiri sendiri. Hal itu terjadi karena terbatasnya diferensiasi dalam masyarakat. Pada kebudayaan ini, masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap objek politik yang luas, kecuali dalam batas-batas tertentu, yaitu terhadap tempat dimana ia terikat secara sempit (Kantaprawira, 1988), atau bahkan orang-orang bersikap apatis terhadap atau terasing dari sistem politik yang ada (Mujani, 2007).

Budaya politik subjek cenderung menjadikan orang bersikap aktif terhadap sistem politik yang secara struktural terdiferensiasi, khususnya terhadap sisi output dari sistem ini, namun bersikap pasif terhadap sisi input dari sistem tersebut. Artinya, masyarakat menganggap bahwa dirinya tidak memiliki peran (tiadanya orientasi politik diri) dalam berbagai kebijakan yang disusun oleh suatu sistem politik dan karenanya harus diterima.

Sedangkan budaya politik partisipan ditandai oleh adanya orientasi tidak hanya terhadap sistem politik yang terdiferensiasi secara struktural, atau terhadap sisi output sistem ini, tetapi juga terhadap sisi input dari sistem bersangkutan dan terhadap diri sebagai partisipan aktif.

Perpaduan budaya politik partisipan, subjek, dan parokial diyakini memiliki pengaruh positif bagi stabilitas demokrasi. Demikianlah dapat dihapami bahwa budaya kewargaan yang dikembangkan itu bukanlah sekadar budaya politik partisipan, melainkan budaya politik partisipan "plus yang lain", kombinasi antara aktivisme dan pasifisme (Mujani, 2007). Dan kombinasi itulah yang melahirkan perilaku politik moderat, bukan radikal. Orientasinya bukanlah kepada perubahan yang bersifat revolusioner, melainkan kepada perubahan secara gradual. Itulah kultur politik demokrasi (Mujani, 2007).

Budaya dan tingkah laku demokratis dipahami sebagai kompleks gabungan beberapa unsur, yaitu: keterlibatan kewargaan yang bersifat sekular (*secular civic engagement*), sikap saling percaya sesama warga (*interpersonal trust*), toleransi, keterlibatan politis (*political engagement*), dukungan terhadap sistem demokrasi, dan partisipasi politik (*political participation*) (Mujani, 2007).

Elemen budaya kewargaan yang paling sentral dan perlu dikembangkan adalah

Islam yang dibawa oleh penutup para nabi ini telah disempurnakan dan dinyatakan oleh Allah sebagai agama yang diridhai-Nya untuk seluruh umat manusia sampai hari akhir nanti.

Islam memiliki beberapa ciri khusus (Ilyas, 2011, p. 43) sebagai berikut:

1. Islam adalah agama yang bersumber dari Allah SWT baik melalui wahyu secara langsung (Al Qur'an) maupun tidak langsung (Sunnah Nabawiyah) (QS 39:2; 32:2)
2. Ajaran Islam bersifat komprehensif (mencakup seluruh aspek kehidupan) (QS 6:38)
3. Ajaran Islam bersifat universal (berlaku untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman (QS 7: 158)
4. Ajaran Islam sesuai dengan fithrah manusia (QS 30:30)
5. Ajaran Islam menempatkan akal manusia pada tempat yang sebaik-baiknya secara proporsional, tidak mendewakan dan tidak pula menghinakannya (QS 7:179; 31:20)
6. Ajaran Islam menjadi rahmat bagi alam semesta (QS 21:107)
7. Ajaran Islam berorientasi ke masa depan (akhirat) tanpa melupakan masa kini (dunia) (QS 28:77)
8. Ajaran Islam menjanjikan surga bagi yang beriman dan neraka bagi yang kufur (QS 98:6-8)

Secara garis besar, ajaran Islam mencakup empat aspek yaitu aqidah, akhlak, ibadah, dan *mu'amalah duniawiyah* (Ilyas, 2011, p. 44).

1. Aqidah: aspek keyakinan terhadap Allah, para malaikat, kitab-kitab suci, para nabi dan rasul, hari akhir dan taqdir.
2. Ibadah: Segala cara dan upacara pengabdian kepada Allah (ritual) yang telah diperintahkan dan diatur tata cara pelaksanaannya dalam Al Qur'an dan Sunnah seperti shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya.
3. Akhlak: Nilai dan perilaku baik yang harus diikuti seperti sabar, syukur, tawakkal, berbakti pada kedua orang tua, berani dan lain sebagainya, serta nilai dan perilaku buruk yang harus di jauhi seperti sombong, takabur, dengki, riya, durhaka kepada kedua orang tua dan lain sebagainya.
4. Mu'amalah: Aspek kemasyarakatan yang mengatur pergaulan hidup manusia di atas bumi, baik tentang harta benda, perjanjian-perjanjian, ketatanegaraan, hubungan antara negara dan lain sebagainya.

Perkataan akhlak sesungguhnya adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Akhlak menurut Ilyas (2015:5) haruslah bersifat konstan, spontan, tidak temporer dan tidak memerlukan pemikiran dan pertimbangan serta dorongan dari luar. Dengan demikian, akhlak kewargaan sesungguhnya adalah sikap dan perilaku warga negara yang bersifat konstan, spontan, tidak temporer dan tidak memerlukan pemikiran dan pertimbangan, serta dorongan dari luar.

Dilihat dari ruang lingkupnya, dengan merujuk pada pendapat Muhammad Abdullah Draz, Ilyas (2015:5) menyatakan bahwa akhlak (kewargaan) dalam perspektif Islam dapat dikelompokkan ke dalam lima bagian: akhlak pribadi, akhlak berkeluarga, akhlak bermasyarakat, akhlak bernegara, dan akhlak beragama. Dengan

agama-pun (termasuk Islam) yang cenderung peserta didiknya homogen dari sisi keyakinan agama, kajian kebajikan kewargaan dalam PKn 'selalu' bersandar pada nilai-nilai kebajikan umum itu.

Walaupun begitu, 'usaha untuk memberikan warna ke-Islam-an dalam kajian PKn, pernah dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta – dan diikuti oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang menyusun buku ajar "PKn (*Civic Education*) untuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah". Selain itu, melalui Indonesia Center for Civic Education (ICCE) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dikembangkan model PKn di Perguruan Tinggi Islam dengan mengembangkan buku ajar "PKn (*Civic Education*): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani".

Usaha di atas – sekalipun baru pada tataran mata kuliah umum di perguruan tinggi – patut diapresiasi, sebagai bagian dari penyebarluasan nilai-nilai Islam dan kebajikan kewargaan melalui PKn. Sayaangnya, gagasan itu belum secara umum dikembangkan sebagai ranah kajian – lebih-lebih menjadi penciri – kajian PKn pada jurusan/program studi PKn/PPKn pada Perguruan Tinggi/LPTK (berbasis) Islam. Persinggungannya dengan kajian Pendidikan Agama (Islam) dan Budi Pekerti barangkali menjadi salah satu alasan komunitas PKn lebih memilih membahas nilai-nilai kebajikan kewargaan tanpa memperkuatnya dengan nilai-nilai agama. Karenanya, tidak keliru, kalau seorang cendekiawan muslim di negara kita dalam ceramah yang penulis ikuti, pernah menyampaikan kritik untuk pembelajaran PKn dengan menyebut kajian PKn di sekolah mengajarkan faham pluralisme agama, yang menganggap semua agama baik, hanya demi menjaga nilai-nilai kebaikan bersama.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpandangan, bagi komunitas PKn pada lembaga-lembaga pendidikan (berbasis) Islam, *civic virtue* perlu dipandang dan dipahat sebagai akhlak kewargaan yang bersumber pada nilai-nilai Islam. Ini menuntut komunitas PKn untuk mengembangkan, memperkuat dan membelajarkan akhlak kewargaan sebagaimana Islam menghendakinya. Hal ini sejalan dengan sasaran akhir PKn untuk pembentukan warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*), dimana salah satu komponen warga negara demikian adalah ketaatannya kepada agama yang dianutnya. Bagi penulis, ketaatan kepada agama yang diyakini menjadi penting sebagai dasar mewujudkan masyarakat Indonesia baru yang dicita-citakan. Sebab, agama (Islam) secara lengkap telah mengatur aspek keberagamaan seseorang baik dalam urusan akidah, ibadah, akhlak, dan urusan mu'amalah.

Dalam hal akhlak, Islam telah memberikan rumusan penting dan komprehensif perlunya warga negara memiliki akhlak yang baik dalam hubungannya dengan Allah SWT, dengan Rasulullah SAW, akhlak sebagai pribadi warga negara, akhlak dalam lingkungan keluarga, akhlak dalam kehidupan bermasyarakat, maupun akhlak warga negara dalam hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah rumusan lengkap akhlak kewargaan yang dapat menunjang terbentuknya warga negara Indonesia yang cerdas dan baik.

Secara umum, Islam didefinisikan sebagai nama agama Allah (*dienullah*) yang diwahyukan kepada para Rasul-Nya sejak Nabi Adam AS sampai kepada Nabi Muhammad SAW (Ilyas, 2011:41). Secara khusus, Islam adalah nama diri dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai mata rantai akhir dari agama Allah yang diturunkan kepada umat manusia. Sebagai mata rantai akhir dari agama Allah,

Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama dalam menanggulangi masalah nasional (gotong royong) 	fungsional di daerah
-----------	---	----------------------

Sumber: (Tilaar, 2004) •

Tabel di atas menunjukkan profil manusia Indonesia, yaitu manusia Pancasila yang sedang menjadi. Profil tersebut merupakan suatu proses perwujudan nilai-nilai Pancasila yang terus berkembang. Selain itu, nilai-nilai Pancasila yang tercantum di dalam kelima sila Pancasila tersebut merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Keutuhan nilai-nilai tersebut menjiwai seluruh proses humanisasi manusia Indonesia.

Realitas multikultural bangsa Indonesia di atas memberi tantangan sekaligus peluang bagi guru PKn di sekolah. Tantangan guru PKn sekarang adalah menjadikan mata pelajaran itu berkhidmat kepada, dan mendorong penguatan nilai-nilai kemanusiaan karena beragam persoalan sosial budaya yang muncul karena keanekaragaman yang ada. Proses PKn harus bersandar secara kukuh kepada budaya Indonesia untuk melahirkan pandangan dunia, nilai-nilai, dan komitmen terhadap nilai-nilai dan keluruhan martabat manusia yang bertumpu pada kejujuran dan pertanggungjawaban. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Banks (2007) yang menyatakan sekolah sedapat mungkin mempersiapkan para siswa dari berbagai ras, etnis, budaya dan kelompok bahasa ke arah warga negara yang efektif dan merefleksikan budaya dan komunitas kewargaan.

Perlu disadari, bahwa masyarakat multikultural Indonesia tidaklah selalu berdampak positif, melainkan tersimpan beragam potensi konflik yang sewaktu-waktu muncul. Karena itu, empati dan toleransi menjadi nilai dasar yang perlu terus dikembangkan baik dalam proses maupun sebagai output pendidikan. Membawa siswa pada persoalan yang kompleks dan spektrum ruang kelas PKn yang luas dirasa tepat, karena sebagaimana dalam kajian Sosiologi, tindakan manusia tidak pernah terjadi dalam "pulau kosong". Dalam konteks ini, pembinaan nilai-nilai akhlak kewargaan tidak bisa dilepaskan dari pembentukan iklim sosial yang kondusif bagi munculnya sikap toleran, egaliter, dan partisipatif. Menurut Abdullah (2005), upaya meminimalisir konflik yang terpenting (termasuk dalam masyarakat yang multikultural) adalah melalui penanaman kesadaran kepada masyarakat akan keragaman (*plurality*), kesetaraan (*equality*), kemanusiaan (*humanity*), keadilan (*justice*) dan nilai-nilai demokrasi (*democratic values*). Dan kesemua itu, dapat dilakukan melalui pembelajaran PKn. Inilah peluang yang dapat kita ambil sebagai komunitas PKn dalam rangka turut berkontribusi membangun bangsa.

Gagasan Kajian Akhlak Kewargaan Perspektif Islam

Mengangkat Islam (yang bersumber pada Qur'an dan Sunnah) sebagai dasar kajian akhlak kewargaan dalam PKn tentu bukanlah hal yang biasa. Sepanjang pemahaman penulis, kajian tentang *civic virtue* sebagai komponen penting budaya kewargaan (*civic culture*) diartikan sebagai kebajikan kewargaan yang bersumber dan berorientasi pada nilai-nilai kebajikan umum (etika/moral). Tidak hanya pada lembaga pendidikan umum yang peserta didiknya berasal dari beragam latar belakang suku bangsa, bahasa, dan agama yang berbeda, tetapi pada lembaga pendidikan dengan label

Perubahan cara berpikir pluralisme menjadi multikulturalisme yang melandasi realitas multikultural Indonesia adalah perubahan kebudayaan yang menyangkut nilai-nilai dasar yang tidak mudah diwujudkan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai konsep multikulturalisme yang sesuai dengan konteks Indonesia, dan pemahaman itu harus berjangka panjang, konsisten, dan membutuhkan kondisi politik yang mendukung.

Masyarakat baru yang merupakan pergeseran dari masyarakat majemuk ke masyarakat multikultural Indonesia yang dicita-citakan adalah masyarakat yang menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai yang mengatur kehidupannya sebagai warga suatu bangsa. Dalam pandangan Rahardjo (1999:111), konsep masyarakat baru itu disebut masyarakat utama sebagai masyarakat yang tinggi tingkat perkembangannya, yang memiliki sistem kelembagaan dan mekanisme yang menjamin berlakunya upaya-upaya masyarakat itu sendiri untuk secara otonom mampu melaksanakan fungsi *amar ma'ruf nahi munkar* dan memelihara iman.

Sebagai masyarakat yang multikultural, maka merupakan hak dari anggota masyarakat untuk mengembangkan masyarakat dan budayanya, yang pada gilirannya menyumbangkan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia. Inilah inti profil manusia Indonesia baru sebagaimana digambarkan dalam Ketetapan MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Secara umum, gambaran profil manusia Indonesia baru itu disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2 Profil Manusia Indonesia Baru

Pancasila	Nilai-nilai yang Disandang Manusia Indonesia	Sumber Nilai/Sarana
Ketuhanan Yang Maha Esa	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai-nilai etika • Nilai moral 	<ul style="list-style-type: none"> • Agama yang dihayati di dalam masyarakat Indonesia • Kebudayaan daerah (suku-suku Nusantara)
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	<ul style="list-style-type: none"> • HAM • Toleransi • Kerukunan hidup antarwarga/antara agama • Kerja sama global untuk kemakmuran dan perdamaian 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran hukum/negara hukum <p>Kerja sama internasional</p>
Persatuan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Saling menghargai perbedaan • Kemauan untuk bersatu • Menghormati simbol-simbol negara persatuan • Rasa bangga sebagai orang Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahasa Indonesia • Sistem pendidikan dan persekolahan • Interaksi antarwarga/antarsuku <p>Pendidikan multikultural</p>
Kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai-nilai demokrasi • Populis (memihak kepada kepentingan rakyat) • Teknologi yang memajukan kemakmuran rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> • Berfungsinya lembaga-lembaga demokrasi <p>IPTEK</p>
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Rasa solidaritas sosial sebagai satu bangsa 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga-lembaga sosial tradisional yang masih

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita juga disuguhi adegan ‘perkelahian’ ala wakil rakyat, rebutan jabatan pimpinan partai politik, ada pemimpin yang ‘berkata kasar dan kotor’, tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang makin merejalela, proses penegakkan hukum dan peradilan yang melukai rasa keadilan masyarakat, konflik masyarakat yang berakar dari perbedaan SARA, serta berbagai perilaku penyelenggara negara yang tidak memberi teladan baik bagi warga bangsanya.

Persoalan multidimensi di atas, diungkap sebab kita (komunitas PKn) patut merasa prihatin, dan perlu turut ambil bagian memecahkan persoalan itu. Kita perlu melatih warga negara agar memiliki komitmen untuk melaksanakan fungsi *amar ma’ruf nahi munkar* (menyuruh kepada kebajikan dan mencegah tindakan yang merusak) sebagai bagian dari akhlak kewargaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akhlak kewargaan perlu terus dikuatkan melalui PKn, terutama menghadapi penetrasi budaya yang tidak sesuai dengan nilai dan karakter bangsa Indonesia. Lebih-lebih pada masyarakat Indonesia yang multikultural yang menurut Winataputra (2012) dikonsepkan dan dibangun dalam konteks negara-kebangsaan Indonesia modern. Hal itu menurut Winataputra (2012) dapat dicermati dari dinamika praksis kehidupan bernegara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai saat ini dengan mengacu pada konstitusi UUD 1945, dan praksis kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konsep masyarakat multikultural (*multicultural society*) perlu dibedakan dengan konsep masyarakat majemuk (*plural society*) yang menunjukkan keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaan suku bangsa. Multikulturalisme dikembangkan dari konsep pluralisme budaya dengan menekankan pada kesederajatan kebudayaan yang ada dalam sebuah masyarakat (Suparlan, 2005:98). Multikulturalisme ini mengusung semangat untuk hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*) dalam perbedaan kultur yang ada baik secara individual maupun secara kelompok dan masyarakat (Azra, 2006, Suparlan, 2005). Individu dalam hal ini dilihat sebagai refleksi dari kesatuan sosial dan budaya dimana mereka menjadi bagian darinya. Dengan demikian, corak masyarakat Indonesia bukan lagi keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Tabel 2 Transformasi Masyarakat Indonesia *Bhinneka Tunggal Ika*

Masyarakat Majemuk (<i>plural society</i>)	Masyarakat Multikultural (<i>multicultural society</i>)
terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, namun tanpa membaur dalam satu unit politik yang tunggal.	sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain.

Sumber: (Arif, 2008)

kebajikan/akhlak kewargaan (*civic virtue*). Akhlak kewargaan adalah kemauan dari warga negara untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi (*...the willingness of the citizen to set aside private interests and personal concerns for the sake of the common good*) (Quigley & Bahmueller, 1991). Tentang hal ini Quigley dan Bahmueller meyakini bahwa kebajikan kewargaan merupakan domain psikososial individu yang secara substantif memiliki dua unsur, yaitu watak kewargaan (*civic disposition*) dan komitmen kewargaan (*civic commitment*).

Watak kewargaan adalah sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi (*...those attitudes and habit of mind of the citizen that are conducive to the healthy functioning and common good of the democratic system*). Sedangkan *civic commitment* adalah atau komitmen warga negara yang bernalar dan diterima dengan sadar terhadap nilai dan prinsip demokrasi konstitusional (*...the freely-given, reasoned commitments of the citizen to the fundamental values and principles of constitutional democracy*) (Quigley & Bahmueller, 1991:11).

Persoalan Akhlak Kewargaan dalam Masyarakat Multikultural

Kajian budaya kewargaan tidaklah selalu berkaitan dengan politik partisipasi warga negara dalam pemerintahan. Tetapi juga menyangkut sikap dan perilaku keseharian warga negara. Penulis menyampaikan beberapa fenomena yang menunjukkan sebagian dari sikap dan perilaku warga negara kita. Awal tahun 2015, kita dikejutkan dengan iklan produk rokok yang memasang tagline "*Mula-mula Malu Malu, Lama-lama Mau*" dengan gambar sepasang laki-laki dan perempuan yang saling berpelukan dan nyaris berciuman. Sontak kemunculan iklan ini menghentak nurani kita. Pro dan kontra muncul. Pro karena iklan itu mengekspresikan seni si pembuatnya, kontra karena iklan itu bukan saja 'bernada' pornografi, yang jelas-jelas dilarang ditampilkan di ruang publik, tetapi juga karena ia sebenarnya menyetujui bahkan mendorong hubungan laki-laki dan perempuan "tanpa batas" sebelum melewati lembaga perkawinan. Tentu saja, ini tidak sejalan dengan nilai budaya dan adat ketimuran, serta nilai-nilai agama yang sebagian besar dianut masyarakat bangsa Indonesia.

Kasus lain, seorang penulis buku, dengan nada provokatif menulis 'tidak salah jika menuruti kemauan pasangan yang sedang dimabuk asmara ketika ia meminta melakukan hubungan layaknya suami istri asmara'. Kilah penulis, hal itu untuk menunjukkan rasa cinta dan kesetiaannya kepada pasangan. Yang terbaru, tulisan pada buku pelajaran di sekolah yang dapat kita pahami sebagai membolehkan seseorang (Islam) membunuh orang lain atas dasar keyakinan agama yang berbeda.

Pada sisi yang lain, kita menyaksikan media televisi, media cetak, online, dan lainnya getol menyuguhkan informasi tentang para pesohor negeri lewat program *infotainment* (baca: gosip). Tiada hari tanpa gosip. Mulai informasi kedekatan dua pasangan selebriti, jalinan asmara, perkawinan, permasalahan rumah tangga, sampai perceraian disajikan dengan beragam cara untuk menarik publik. Termasuk juga informasi kelahiran, kematian juga menjadi tayangan yang tidak terlewatkan. Pokoknya, segala hal yang berkaitan dengan selebriti, baik atau buruk tersaji lewat *infotainment* itu. Dalam hal ini, media massa tidak lagi berperan sebagai tuntunan, tetapi lebih berorientasi tontonan semata.

- Modernitas. Bogor: Brighten Press.
- Banks, J. A. (2007). *Educationg Citizen in a Multicultural Society* (2 ed.). New York: Teachers College Press.
- Chamim, A. I. (2003). Civic Education di Perguruan Tinggi: Beberapa Catatan Pengalaman. In S. Malian, & S. Marzuki (Eds.), *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia* (pp. 5-16). Yogyakarta: UII Press.
- Ilyas, Y. (2011). *Cakrawala Al-Qur'an: Tafsir Tematis tentang Berbagai Aspek Kehidupan*. Yogyakarta: Itqan Publishing.
- Ilyas, Y. (2015). *Kuliah Akhlaq*. Yogyakarta: Kerjasama Lembaga Pengembangan dan Studi Islam UAD dengan Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam UMY.
- Kantaprawira, R. (1988). *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru.
- Mujani, S. (2007). *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Quigley, C. N., & Bahmueller, C. F. (1991). *Civitas: A Framework for Civic Education*. Calabasas: Center for Civic Education.
- Rahardjo, D. (1999). *Masyarakat Madani, Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Kerjasama Pustaka LP3ES dan Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF).
- Suparlan, P. (2005). *Sukubangsa dan Hubungan Antar Sukubangsa*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- The LIFE Center and Center for Multicultural Education. (2007). *Learning in and out of School in Diverse Environment: Life-Long, Life-Wide, Life-Deep*. Seatle: Center For Multicultual Education.
- Tilaar, H. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Winataputra, U. S. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)*. Bandung: Widya Aksara Press.

demikian, akhlak kewargaan, sebagaimana kita sebut sebagai komponen penting budaya kewargaan bagi terwujudnya masyarakat demokrasi Indonesia yang kuat, mencakup spektrum yang luas, meliputi seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan Allah SWT maupun secara horizontal sesama makhluk-Nya.

Dalam kerangka pengembangan kajian PKn – termasuk akhlak kewargaan – pada lembaga pendidikan (berbasis) Islam, penulis berpandangan dan mengajak kepada komunitas PKn untuk membangun atmosfer akademik penguatan kajian akhlak kewargaan perspektif Islam melalui: 1) kajian rutin akademik dengan melibatkan dan mensinergikan komunitas PKn dan komunitas pendidikan Agama dan Budi Pekerti (seperti kelompok dosen/guru Agama Islam) – termasuk para pemuka Agama Islam – untuk melahirkan gagasan dan tanggung jawab bersama dalam pembentukan dan penguatan akhlak kewargaan bagi warga negara; 2) menyebarluaskan gagasan perlunya penguatan akhlak kewargaan perspektif Islam dalam berbagai forum ilmiah; 3) memasukkan nilai-nilai Islam (yang bersumber dari Al Qur'an dan As Sunah) dalam proses pembelajaran di kelas PKn; dan 4) komunitas PKn diharapkan dapat menjadi teladan yang mencerminkan akhlak kewargaan terpuji bagi para warga negara yang lainnya (termasuk bagi para peserta didik), baik dalam hubungannya dengan Allah SWT, dengan Rasulullah SAW, akhlak sebagai pribadi warga negara, akhlak dalam lingkungan keluarga, akhlak dalam kehidupan ber masyarakat, maupun akhlak warga negara dalam hubungannya dengan kehidupan ber bangsa dan bernegara.

Penulis meyakini, melalui penguatan akhlak kewargaan perspektif Islam yang berdimensi luas pada kajian PKn, komunitas PKn – terutama pada lembaga pendidikan (berbasis) Islam – dapat memberikan kontribusi besar bagi perbaikan dan pengembangan bangsa dan karakter menuju masyarakat Indonesia baru yang dicita-citakan.

Simpulan

Mengangkat Islam sebagai dasar pijakan bagi pengembangan PKn, termasuk akhlak kewargaan, sebagaimana dikemukakan di atas tidaklah semudah yang dibayangkan. Perlu kesungguhan dari komunitas PKn untuk mengembangkan, memperkuat, dan membelajarkan kajian-kajian PKn perspektif Islam. Dan hal itu dapat diawali pada komunitas-komunitas PKn di lembaga pendidikan Islam, seperti pada perguruan di lingkungan organisasi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, dan sebagainya. *Wallahu'alam bi shawab.*

Daftar Rujukan

- Abdullah, A. (2005). Kesadaran Multikultural: Sebuah Gerakan "Interest Minimalization" dalam Meredakan Konflik Sosial. In M. A. Yaqin, *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan* (pp. xi-xx). Yogyakarta: Pilar Media.
- Arif, D. B. (2008). *Pengembangan Warga Negara Multikultural Implikasinya terhadap Kompetensi Kewarganegaraan*. Sekolah Pascasarjana, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Azra, A. (2006). Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme. In *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan*

**SAMBUTAN KETUA PELAKSANA
SEMINAR DAN RAKERNAS AP3KNI TAHUN 2015**



Pada tanggal 4 April 2015, bertempat di Auditorium Gedung M. Nu'man Somantri FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, kembali berkumpul sejumlah akademisi, para guru dari berbagai jenjang, dan para pemerhati PKn yang *concern* terhadap pengembangan pendidikan kewarganegaraan untuk membicarakan tema seminar yang sangat menantang yakni **“Penguatan Komitmen Komunitas Akademik dalam Memperkokoh Jatidiri PKn”**.

Saya sangat senang, keinginan panitia untuk menghimpun gagasan para peserta seminar dalam bentuk prosiding, direspon secara luar biasa, dimana terkumpul lebih dari 75 artikel, yang tentu saja dari sisi konten sangat relevan dengan tema sentral seminar. Saya memaknai tingginya respon tersebut sebagai *positive trend* untuk membangun kesadaran (*consciousness*), kemauan (*willingness*) serta tanggapan (*respon*) atas berbagai fenomena empirik yang menggejala dalam kehidupan saat ini.

Penyusunan prosiding seminar ini, didorong oleh *academic spirit* untuk mengembangkan budaya menulis dan budaya bertukar pikiran dan pengalaman terbaik (*best practice*) secara konstruktif dari para pihak yang memiliki perhatian terhadap PKn, melalui gagasan atau ide yang dikonstruksi dalam artikel ilmiah. Tradisi akademik seperti inilah yang menurut saya sangat mendukung ke arah pengembangan *academic culture* yang baik.

Atas nama panitia pelaksana, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada berbagai pihak, atas kerjasama yang baik, memungkinkan prosiding seminar ini dapat dirampungkan dengan baik, kendatipun dalam aspek-aspek tertentu, masih terdapat hal yang harus disempurnakan lagi. Sudah barang tentu, hal ini menjadi *positive challenge* bagi kami untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan untuk masa-masa yang akan datang.

Kepada para pembaca yang budiman, saya sampaikan selamat membaca!

Bandung, 30 Maret 2015
Ketua Panitia,

Syaifullah, M.Si

DAFTAR ISI

Pengantar Editor	iii
Sambutan Rektor	v
Sambutan Dekan FPIPS	vi
Sambutan Ketua Departemen PKN FPIPS	vii
Sambutan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) AP3KNI	viii
Sambutan Ketua Pelaksana Seminar dan Rakernas AP3KNI Tahun 2015	ix
1. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PKN) UNTUK GENERASI EMAS INDONESIA: REKONSTRUKSI CAPAIAN PEMBELAJARAN Udin S. Winataputra, Riza Alrahman	1
2. PERANAN STRATEGIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NASIONAL DALAM MEMBANGUN NEGARA BANGSA INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA Soedijarto	24
3. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MENYIAPKAN GENERASI EMAS INDONESIA Sjamsi Pasandaran	36
4. PENGEMBANGAN <i>CIVIC INTELLIGENCE</i> BERBASIS KEGIATAN EKSTRA KURIKULER DI SEKOLAH DASAR Masrukhi dan Tommi Yuniawan	52
5. REPOSISI PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA Dasim Budimansyah	66
6. PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI PKN SEBAGAI DISIPLIN ILMU TERINTEGRASI BERBASIS KKN Sapriya	76
7. DEMOKRASI DALAM PERSIMPANGAN MAKNA Cecep Darmawan	95
8. PEMBERDAYAAN GENERASI MUDA SEBAGAI DASAR FILOSOFIS DARI KETERLIBATAN WARGANEGARA (<i>CIVIC ENGAGEMENT</i>) : TINJAUAN TENTANG PROGRAM MAHASISWA WIRAUSAHA (PMW) Syaifullah	102
9. MANAJEMEN PEMBELAJARAN DALAM MEMPERKUAT IMPLEMENTASI KURIKULUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN), Apeles Lexi Lonto	121

10. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI UNTUK PENGEMBANGAN KESADARAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN <i>SOFT SKILLS</i> MAHASISWA Asep Mahpudz.....	130
11. REVITALISASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MEMBANGUN WARGANEGARA SADAR KONSTITUSI Atmawarni	140
12. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : UPAYA UNTUK MEMBANGUN KARAKTER BANGSA DI LINGKUNGAN MAHASISWA Aziz Taufik Hirzi.....	146
13. PERAN PKN DALAM MEMBANGUN KESADARAN AKAN PENTINGNYA KESEIMBANGAN ANTARA PANCASILA SSBAGAI “RUH” DAN NEGARA INDONESIA SEBAGAI “BADAN” Bartolomeus Samho.....	152
14. STUDI KORELASI ANTARA PEMANFAATAN SUMBER BELAJAR DENGAN MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA STKIP SINTANG Dessy Triana Relita.....	165
15. MENGGAGAS PENGUATAN KAJIAN AKHLAK KEWARGAAN (<i>CIVIC VIRTUE</i>) PERSPEKTIF ISLAM DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL Dikdik Baehaqi Arif.....	175
16. MAPPING KESADARAN HUKUM MAHASISWA DI LUAR KAMPUS (Studi Kasus Perilaku Mahasiswa di Universitas X) M. Yahya Arwiyah.....	186
17. PENGUASAAN KONSEP IPS DALAM UPAYA PEMBERIAN PEMBEKALAN PEMECAHAN MASALAH SOSIAL PADA SISWA SEKOLAH DASAR Eliana Yunitha Seran.....	190
8. TRANSFORMASI BUDAYA LOKAL MASYARAKAT SIMEULUE (<i>SMONG</i>) DALAM PENGUATAN MATERI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) Hasbi Ali.....	201
9. REVITALISASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MEMBANGUN WARGANEGARA SADAR KONSTITUSI Hasan Suryono.....	211
0. PENDIDIKAN DEMOKRASI SEBAGAI PENGUATAN JATI DIRI PKN MELALUI PENGEMBANGAN KULTUR AKADEMIK Indriyana Dwi Mustikarini	219
1. PIAGAM MADINAH DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 M: Sulthon	226

22. AKTUALISASI PENDIDIKAN KETELADANAN DALAM MEREDAM IDEOLOGI RADIKAL DI INDONESIA Maimun	242
23. SEMANGAT KEBANGSAAN PADA MAHASISWA ASAL WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA Mardawani.....	251
24. BERANI MENGAJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBAGI PERAN DENGAN MEDIA PEMBELAJARAN Miming Karmilah	261
25. KEMAMPUAN SISWA DALAM MANAJEMEN MITIGASI BENCANA SEBAGAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI <i>CIVIC SKILL</i> WARGA NEGARA Muhammad Mona Adha	276
26. KEPEMIMPINAN DALAM INTEGRITAS PELEMBAGAAN DAN PEMBUDAYAAN PANCASILA Nana Setialaksana.....	294
27. PENEGUHAN JATI DIRI BANGSA DAN KARAKTER KE INDONESIAAN MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI ERA GLOBALISASI Nurul Zuriah	301
28. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI ERA GLOBAL Runik Machfiroh	312
29. OPTIMALISASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI Rusli Yusuf	318
30. KONTRIBUSI KEGIATAN EKSTRAKULIKULER PADA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Sabarudin.....	328
31. PENGARUH KOMPETENSI PROFESIONAL GURU TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN POKOK BAHASAN HAK ASASI MANUSIA DI KELAS VII PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Sapto Purnomo	336
32. REVITALISASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA MENINGKATKAN KESADARAN BERKONSTITUSI WARGA NEGARA INDONESIA Siska Diana Sari	341

33. PENGUATAN JATIDIRI PKN MELALUI PENGEMBANGAN KULTUR AKADEMIK Sri Kunarsih.....	350
34. MENUJU MASYARAKAT DEMOKRATIS MELALUI PENDIDIKAN HUKUM YANG HOLISTIK Sumaryati.....	354
35. SUBSTANSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN) KOMUNITAS BAGI APARAT PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT DESA MENGHADAPI ARUS MODERNISASI POLITIK Supriyadi.....	362
36. DESAIN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS <i>GREEN CONSTITUTION</i> DALAM MEMBANGUN KESADARAN BERKONSTITUSI Susan Fitriasari	376
37. URGENSI PENDIDIKAN POLITIK DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI BERKEADABAN Triwahyuningsih.....	384
38. PENERAPAN PEMBELAJARAN PERADILAN SEMU UNTUK MEMAHAMI KONSEP HUKUM DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) Winarno	391
39. PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN GUNA MENYADARKAN WARGANEGARA AKAN HAK DAN KEWAJIBAN Yunisca Nurmalisa.....	396
40. KAJIAN MAKNA NILAI HISTORIS DAN BUDAYA DALAM <i>NATIONAL COSTUME</i> DI AJANG INTERNASIONAL SEBAGAI JATI DIRI BANGSA Agustinus Tampubolon.....	403
41. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: ANTARA CITA DAN REALITA Triyanto	417
42. UPAYA MEMBANGUN JATI DIRI BANGSA GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH DALAM MEMBINA BUDAYA DISIPLIN UNTUK MEWUJUDKAN KAREKTER BANGSA Dede Iswandi.....	423
43. REAKTUALISASI EMPAT KONSENSUS KEBANGSAAN INDONESIA UNTUK MEMBENTUK WARGA NEGARA YANG CERDAS DAN BAIK (<i>SMART AND GOOD CITIZENS</i>) Efi Miftah Faridli.....	430

44.	PENGEMBANGAN EKONOMI KEWARGANEGARAAN (<i>ECONOMIC CIVIC</i>) PADA MASYARAKAT DEMOKRATIS Epin Saepudin.....	440
45.	MEMBUDAYAKAN KESADARAN BERKONSTITUSI MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAN Pebriyenni.....	453
(46)	PENGUATAN JATIDIRI PKn MELALUI PENDIDIKAN KAREKTER SEBAGAI BENTUK PARTISIPASI PEMBANGUNAN WARGA NEGARA DALAM MENGHADAPI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) TAHUN 2015 Riyan Yudistira	463
47.	REPOSISI HAK ASASI MANUSIA DALAM KAJIAN KURIKULER PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA Samsuri	478
48.	PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN ANTIKORUPSI UNTUK MENDUKUNG KARAKTER KEJUJURAN SISWA DI SEKOLAH MELALUI PKn Shilmy Purnama	485
49.	PENGUATAN PENGUASAAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN CALON GURU PPKn MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS <i>BLENDED</i> <i>LEARNING</i> DI PERGURUAN TINGGI Siti Awalayah.....	492
50.	MENANAMKAN KEBAIKATAN MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Sylvester Kanisius	501
51.	REVOLUSI MENTAL MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Wildan Nurul Fajar	509
52.	KUALITAS KINERJA GURU PKN SEBAGAI UPAYA PENGOPTIMALISASI PROSES DAN HASIL BELAJAR Julien Biringan.....	517
53.	MEMAKNAI LINGUISTIC TURN DAN NARRATIVE TURN DALAM PEMIKIRAN POSTMODERNIS Ana Andriani	530
54.	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TRANSFORMATIF UNTUK MENGEMBANGKAN WAWASAN GLOBAL PESERTA DIDIK DI SEKOLAH Mukhamad Murdiono	539
55.	UPAYA MEMBANGUN KARAKTER BANGSA YANG BERPANCASILA DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA Marintan Lasrida Sitorus	551

56. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA UNTUK MENJAWAB TANTANGAN KEKINIAN DI INDONESIA Nurhadianto	568
57. TANTANGAN PKn SEBAGAI SISTEM PENGETAHUAN TERINTEGRASI Nurharini.....	579
58. KERANGKA PEMIKIRAN PEMBELAJARAN HUKUM PIDANA DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Petrus Irianto	591
59. URGENSI PENILAIAN RANAH AFEKTIF DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Rohani	599
60. RELEVANSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DENGAN PENDIDIKAN DAMAI DALAM MEMBANGUN WARGANEGARA DEMOKRATIS DI SEKOLAH Candra Cuga	610
61. PANDANGAN FILSAFAT ESSENSIALISME DALAM MEMPERKOKOH PKn SEBAGAI <i>INTEGRATED SYSTEM OF KNOWLEDGE</i> Eli Karlani	622
62. PRAKSIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH : BELAJAR DARI PENGALAMAN Leni Anggraeni	634
63. KOSMOPOLITANISME APAKAH ANCAMAN ATAU TANTANGAN BAGI PENGEMBANGAN NASIONALISME INDONESIA? Lili Halimah	645
64. MEMOTRET CIVIC ENGAGEMENT DI INDONESIA Sunarto Amus	656
65. EKSISTENSI PKN DALAM KEMANDIRIAN PENGELOLAAN INSTITUSI ADALAH SEBUAH KENISCAYAAN Susena.....	669
66. PERAN AP3KNI SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS ETNOPEDAGOGIK UNTUK MEMBANGUN GENERASI EMAS KEBANGKITAN NASIONAL MODERN Iim Siti Masyitoh.....	674
67. PENGUATAN JATIDIRI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MELALUI PENUMBUHAN BUDAYA POLITIK PARTISIPAN Deny Setiawan.....	684

68. KONSTRUK KURIKULER PENDIDIKAN AFEKSI SEBAGAI PEMBENTUK KARAKTER DALAM PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARA	
Nani Nur'aeni.....	696
69. PERANAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PEMBINAAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK	
Dwi Iman Muthaqin	711
70. METODE PEMBELAJARAN KLIK BERBASIS <i>MIND MAP</i> DALAM MEMANFAATKAN CARA KERJA OTAK SEBAGAI MESIN ASOSIASI UNTUK MENGATASI KESULITAN BELAJAR MAHASISWA PADA MATA KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM	
Dadang Sundawa	720
71. REVITALISASI GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS: MENJAWAB TANTANGAN BARU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) PADA LEVEL PUBLIK	
Sri Wahyuni Tanshzil	735
72. <i>CITIZEN POLITICS</i> (POLITIK KEWARGANEGARAAN) SEBAGAI PENGEMBANGAN ILMU DALAM KAJIAN PKn: TANTANGAN ANALISIS FILOSOFIK	
Halking	743
73. ESENSI SOSIALISASI KEBIJAKAN PELAYANAN PAJAK SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN WARGA NEGARA DALAM MEMBAYAR PAJAK DI PROVINSI JAWA BARA	
Prayoga Bestari.....	757
74. REAKTUALISASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM MEMBANGUN KARAKTER MAHASISWA MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI	
Rini Irianti Sundry	767
75. PENGUATAN JATI DIRI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGAKTUALISASIKAN MORALITAS PENEGAKAN HUKUM UNTUK MEMBENTUK <i>GOOD CITIZEN</i>	
Triana Rejekiningsih.....	775
76. PROSES PENGUATAN KARAKTER MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MELALUI KEGIATAN EKSTRA KURIKULER	
Ruslan	789
77. MEMAKNAI HAKIKAT DAN PELAKSANAAN KEDAULATAN RAKYAT INDONESIA	
Yuyus Kardiman	798

78. PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KONTEKSTUAL BERBASIS <i>LIVING VALUES EDUCATION</i> : SEBUAH PENGALAMAN PRAKSIS Kokom Komalasari.....	811
79. URGENSI PENGUATAN PKN SEBAGAI PROGRAM SOSIAL-KULTURAL KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBINA KARAKTER SISWA Rahmat.....	824
80. ANTIKORUPSI SEBAGAI SUMBER MATERI DAN NILAI DALAM PEMBELAJARAN PPKn DI SEKOLAH Harmanto dan Totok Suyanto	839
81. PENGUATAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI STRATEGI REVITALISASAI NILAI-NILAI PANCASILA DAN UNTUK MENINGKATKAN KARAKTER DAN JATI DIRI BANGSA, Wahyu Widodo	849
82. STUDI PENELUSURAN ALUMNI PROGRAM STUDI D3 dan S1 PPKn PIPS- FKIP UNIVERSITAS TERBUKA Syaiful Mikdar, Sriyono, Sri Sumiyati	861
83. PENYELARASAN KURIKULUM S1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DENGAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNi) Sriyono, Syaeful Mikdar dan Yos Sudarso	877
84. PERAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBINA SIKAP DEMOKRATIS SISWA SMP MUHAMMADIYAH 1 PURWOKERTO Elly Hasan Sadeli	900
85. MEMBANGUN WARGA NEGARA SADAR KONSTITUSI MELALUI REVITALISASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Sri Suneki	907
86. PENTINGNYA PEMAHAMAN KE- INDONESIAAN BAGI WARGA BANGSA INDONESIA DI ERA GLOBALISASI (KASUS KE INDONESIAAN DI PAPUA) Bernarda Meteray	913
87. INKLUSI DEMOKRASI TERHADAP MINORITAS (Tantangan Indonesia dalam Membangun Politik Inklusi Demokratis) Halili.....	923

sesuai kebutuhan belajar seperti bahan pembelajaran, alat pembelajaran serta teknik pembelajaran yang tepat guna sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar mahasiswa semakin maksimal. Melalui pemanfaatan sumber belajar yang kreatif, inovatif akan memberikan dampak positif bagi perkembangan belajar mahasiswa yang ditandai oleh maksimalnya motivasi belajar mahasiswa itu sendiri.

2. Bagi pihak kampus, kiranya dapat menyediakan sumber belajar yang lain seperti jaringan internet yang lebih baik dari yang sebelumnya dan penambahan ruang khusus untuk para mahasiswa mengakses internet dalam rangka mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen.
3. Bagi mahasiswa, bahwa sumber belajar penting untuk dikembangkan dan dimanfaatkan seefektif mungkin berkaitan dengan proses belajar mengajar. Mahasiswa diharapkan memiliki sikap terbuka terhadap perkembangan zaman dan mampu mengaktualisasikan sumber belajar yang ada di kampus sebagai modal dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik.

Daftar Rujukan

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hamalik, Oemar. 2009. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Rohani, Ahmad. 2004. *Pengelolaan Pengajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Seels dan Richey. 1994. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru.
- Sudjana. 2005. *Metode Statistik*, Bandung : PT. Tarsito.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*. Bandung: Alfabeta
- Susilo. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sardiman. AM. 2006. *Interaksi dan Motivasi Brelajar Mengajar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutrisno Hadi. 2004. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi offset.
- Sutikno, M. Sobry. 2009. *Belajar dan Pembelajaran “Upaya Kreatif dalam Mewujudkan Pembelajaran yang Berhasil”*. Bandung: Prospect.
- Sumiati dan Asra. 2011. *Metode Pembelajaran*. Bandung : CV Wacana Prima.

MENGGAGAS PENGUATAN KAJIAN AKHLAK KEWARGAAN (*CIVIC VIRTUE*) PERSPEKTIF ISLAM DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Oleh,
Dikdik Baehaqi Arif

Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam mengembangkan budaya kewargaan (*civic culture*) yang diperlukan dalam rangka membangun sistem politik demokrasi. Sebagai program kurikuler pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berorientasi untuk mempersiapkan warga negara muda agar memiliki kemampuan untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat politik. Pada masyarakat Indonesia yang multikultural, budaya kewargaan perlu dibangun di atas fondasi akhlak kewargaan, yang meliputi karakter dan komitmen kewargaan berdasarkan pada nilai Pancasila. Tulisan ini membahas gagasan perlunya penguatan kajian akhlak kewargaan perspektif Islam, terutama pada komunitas PKn di lembaga pendidikan (berbasis) Islam untuk memperkuat peran warga negara dalam masyarakat multikultural Indonesia.

Kata Kunci: Budaya Kewargaan, Akhlak Kewargaan, Islam, Masyarakat Multikultural, Pendidikan Kewarganegaraan

Pendahuluan

Diantara karakteristik masyarakat Indonesia yang multikultural adalah hadirnya lembaga penyelenggara pendidikan termasuk di dalamnya masukan (*input*) siswa dalam lingkup pendidikan itu yang sangat beragam. Hampir di setiap lembaga pendidikan, baik dari mulai tingkat dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi, dapat kita temui peserta didik yang memiliki karakteristik yang berbeda. Kenyataan itu dilatarbelakangi oleh perbedaan kelompok suku bangsa, ras, budaya, agama, gender, maupun bahasa asal mereka. Bukan saja di lingkungan sekolah, mereka juga akan berhadapan dengan berbagai perbedaan lainnya di lingkungan sosial atau budaya mereka sehari-hari. Inilah kekayaan bangsa, sekaligus juga tantangan bagi para pendidik dalam merancang program pembelajaran yang mengakomodir keberagaman itu dengan tetap tidak melupakan fungsi dan tujuan pendidikan.

Menghadapi kondisi kemajemukan itu, para pendidik perlu berpikir ulang tentang bagaimana menjalankan peran dan fungsinya dalam proses pembelajaran di kelas yang siswanya berbeda dalam suku bangsa, ras, budaya, agama, gender, maupun bahasa asal mereka. Sebuah penelitian yang dilakukan tim The LIFE Center dan Center for Multicultural Education di University of Washington, Seattle USA, merumuskan

⁵⁶Sebagian naskah ini pernah disampaikan dalam Semiloka Nasional Pendidikan yang diselenggarakan oleh Program Studi PPKn STKIP Garut, di Pendopo Kabupaten Garut, Sabtu, 17 Mei 2014

Dosen pada Program Studi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Jl. Pramuka No. 42 Sidikan Umbulharjo Yogyakarta 55161. Telp. 081394036944, e-mail: dikdikbaehaqi@ppkn.uad.ac.id

pentingnya pemahaman kembali prinsip-prinsip pembelajaran (*learning princiles*) untuk siswa yang multikultural. Laporan itu mengidentifikasi empat prinsip pembelajaran kontemporer yang perlu dipahami oleh penyelenggara pendidikan.

1. *Learning is situated in broad socio-economic and historical contexts and is mediated by local cultural practices and perspectives.*
2. *Learning takes place not only in school but also in the multiple contexts and valued practices of everyday lives across the life span.*
3. *All learners need multiple sources of support from a variety of institutions to promote their personal and intellectual development.*
4. *Learning is facilitated when learners are encouraged to use their home and community language resources as a basis for expanding their linguistic repertoires.* (The LIFE Center and Center for Multicultural Education, 2007)

Keempat prinsip pembelajaran di atas terasa tepat dipraktikkan dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia. Para siswa perlu diajak untuk memahami lingkungan belajar yang cukup luas, dimediasi oleh praktik dan perspektif budaya lokal – budaya yang merupakan hasil cipta, karsa, dan karya genuine manusia Indonesia. Demikian pula bahwa pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam ruang kelas sekolah yang terbatas, tetapi juga dalam kontes dan nilai yang banyak di luar sekolah. Hal demikian karena setiap pembelajar membutuhkan sumber untuk pengembangan diri dan intelektual mereka.

Proses pembelajaran diharapkan mampu memfasilitasi peserta didik dari berbagai latar belakang untuk dapat mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang mampu menghargai, menghormati dan bekerjasama dengan orang/kelompok dari berbagai latar belakang; berperilaku mengutamakan kepentingan umum; mempromosikan hak individu, keanekaragaman dan kesetaraan; menjunjung kebenaran, cinta tanah air; tidak larut dalam pengkultusan tokoh, kelompok dan partai, ras, etnik, bahasa dan agama/keyakinan; mau mengakui kekurangan dan kesalahan, mau belajar dari kekurangan dan kesalahan, tidak mudah dihegemoni dan mudah mencari kambing hitam atau memanipulasi sesuatu yang merugikan orang lain, tidak mudah berprasangka buruk kepada individu atau kelompok lain; dan kritis sesuai konteks ruang dan waktu (Arif, 2008). Nilai budaya itu diperlukan untuk membangun sistem politik demokrasi konstitusional, yang ditandai oleh adanya kebebasan (berpendapat, berkelompok, berpartisipasi), menghormati orang/kelompok lain, kesetaraan, kerjasama, persaingan, dan kepercayaan (Chamim, 2003).

Dalam pada itu, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) di sekolah memerankan peran strategis dalam memfasilitasi siswa agar mampu mengembangkan nilai dan sikap yang menghargai perbedaan, baik di lingkungan sekolah, maupun pada lingkungan luar sekolah yang lebih luas untuk terwujudnya kehidupan demokratis berkeadaban berdasarkan Pancasila. Upaya tersebut, tidaklah hadir dengan sendirinya, tetapi mesti dirancang dan dikembangkan dengan baik agar tidak terjebak pada formalitas belaka. Siswa tidak hanya difasilitasi untuk memahami keberagaman, tetapi siswa juga harus memiliki akhlak kewargaan (*civic virtue*) demi terbentuknya budaya kewargaan (*civic culture*) berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Pembahasan

Perspektif Budaya Kewargaan

Pemahaman tentang budaya kewargaan (*civic culture*) tidak bisa dilepaskan dari studi-studi tentang demokrasi. Konsep ini diperkenalkan pertama kali oleh Gabriel Almond dan Sydney Verba (1963). *Civic culture* dipahami sebagai orientasi psikologis terhadap objek sosial, atau sikap terhadap sistem politik dan terhadap diri sebagai seorang aktor politik (Mujani, 2007). Orientasi ini termasuk pengetahuan atau kepercayaan, perasaan atau afeksi, dan evaluasi atau penilaian terhadap sistem politik secara umum, input dan output politik, dan peran seseorang dalam sistem politik. Diyakini bahwa variasi di dalam orientasi dan sikap ini mempengaruhi partisipasi dan penerimaan terhadap sistem demokrasi, yang pada gilirannya mempengaruhi stabilitas demokrasi (Mujani, 2007).

Dalam pembahasannya tentang orientasi politik itu, Almond dan Verba meyakini bahwa ada tiga jenis budaya politik: budaya politik parokial (*parochial*), budaya politik subjek, dan budaya politik partisipan. Budaya politik parokial ditandai oleh tidak terdapatnya peranan politik yang bersifat khas dan berdiri sendiri. Hal itu terjadi karena terbatasnya diferensiasi dalam masyarakat. Pada kebudayaan ini, masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap objek politik yang luas, kecuali dalam batas-batas tertentu, yaitu terhadap tempat dimana ia terikat secara sempit (Kantaprawira, 1988), atau bahkan orang-orang bersikap apatis terhadap atau terasing dari sistem politik yang ada (Mujani, 2007).

Budaya politik subjek cenderung menjadikan orang bersikap aktif terhadap sistem politik yang secara struktural terdiferensiasi, khususnya terhadap sisi output dari sistem ini, namun bersikap pasif terhadap sisi input dari sistem tersebut. Artinya, masyarakat menganggap bahwa dirinya tidak memiliki peran (tiadanya orientasi politik diri) dalam berbagai kebijakan yang disusun oleh suatu sistem politik dan karenanya harus diterima.

Sedangkan budaya politik partisipan ditandai oleh adanya orientasi tidak hanya terhadap sistem politik yang terdiferensiasi secara struktural, atau terhadap sisi output sistem ini, tetapi juga terhadap sisi input dari sistem bersangkutan dan terhadap diri sebagai partisipan aktif.

Perpaduan budaya politik partisipan, subjek, dan parokial diyakini memiliki pengaruh positif bagi stabilitas demokrasi. Demikianlah dapat dihapami bahwa budaya kewargaan yang dikembangkan itu bukanlah sekadar budaya politik partisipan, melainkan budaya politik partisipan "plus yang lain", kombinasi antara aktivisme dan pasifisme (Mujani, 2007). Dan kombinasi itulah yang melahirkan perilaku politik moderat, bukan radikal. Orientasinya bukanlah kepada perubahan yang bersifat revolusioner, melainkan kepada perubahan secara gradual. Itulah kultur politik demokrasi (Mujani, 2007).

Budaya dan tingkah laku demokratis dipahami sebagai kompleks gabungan beberapa unsur, yaitu: keterlibatan kewargaan yang bersifat sekular (*secular civic engagement*), sikap saling percaya sesama warga (*interpersonal trust*), toleransi, keterlibatan politis (*political engagement*), dukungan terhadap sistem demokrasi, dan partisipasi politik (*political participation*) (Mujani, 2007).

Elemen budaya kewargaan yang paling sentral dan perlu dikembangkan adalah

kebajikan/akhlak kewargaan (*civic virtue*). Akhlak kewargaan adalah kemauan dari warga negara untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi (*...the willingness of the citizen to set aside private interests and personal concerns for the sake of the common good*) (Quigley & Bahmueller, 1991). Tentang hal ini Quigley dan Bahmueller meyakini bahwa kebajikan kewargaan merupakan domain psikososial individu yang secara substantif memiliki dua unsur, yaitu watak kewargaan (*civic disposition*) dan komitmen kewargaan (*civic commitment*).

Watak kewargaan adalah sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi (*...those attitudes and habit of mind of the citizen that are conducive to the healthy functioning and common good of the democratic system*). Sedangkan *civic commitment* adalah atau komitmen warga negara yang bernalar dan diterima dengan sadar terhadap nilai dan prinsip demokrasi konstitusional (*...the freely-given, reasoned commitments of the citizen to the fundamental values and principles of constitutional democracy*) (Quigley & Bahmueller, 1991:11).

Persoalan Akhlak Kewargaan dalam Masyarakat Multikultural

Kajian budaya kewargaan tidaklah selalu berkaitan dengan politik partisipasi warga negara dalam pemerintahan. Tetapi juga menyangkut sikap dan perilaku keseharian warga negara. Penulis menyampaikan beberapa fenomena yang menunjukkan sebagian dari sikap dan perilaku warga negara kita. Awal tahun 2015, kita dikejutkan dengan iklan produk rokok yang memasang tagline "*Mula-mula Malu Malu, Lama-lama Mau*" dengan gambar sepasang laki-laki dan perempuan yang saling berpelukan dan nyaris berciuman. Sontak kemunculan iklan ini menghentak nurani kita. Pro dan kontra muncul. Pro karena iklan itu mengekspresikan seni si pembuatnya, kontra karena iklan itu bukan saja 'bernada' pornografi, yang jelas-jelas dilarang ditampilkan di ruang publik, tetapi juga karena ia sebenarnya menyetujui bahkan mendorong hubungan laki-laki dan perempuan "tanpa batas" sebelum melewati lembaga perkawinan. Tentu saja, ini tidak sejalan dengan nilai budaya dan adat ketimuran, serta nilai-nilai agama yang sebagian besar dianut masyarakat bangsa Indonesia.

Kasus lain, seorang penulis buku, dengan nada provokatif menulis 'tidak salah jika menuruti kemauan pasangan yang sedang dimabuk asmara ketika ia meminta melakukan hubungan layaknya suami istri asmara'. Kilah penulis, hal itu untuk menunjukkan rasa cinta dan kesetiaannya kepada pasangan. Yang terbaru, tulisan pada buku pelajaran di sekolah yang dapat kita pahami sebagai membolehkan seseorang (Islam) membunuh orang lain atas dasar keyakinan agama yang berbeda.

Pada sisi yang lain, kita menyaksikan media televisi, media cetak, online, dan lainnya getol menyuguhkan informasi tentang para pesohor negeri lewat program *infotainment* (baca: gosip). Tiada hari tanpa gosip. Mulai informasi kedekatan dua pasangan selebriti, jalinan asmara, perkawinan, permasalahan rumah tangga, sampai perceraian disajikan dengan beragam cara untuk menarik publik. Termasuk juga informasi kelahiran, kematian juga menjadi tayangan yang tidak terlewatkan. Pokoknya, segala hal yang berkaitan dengan selebriti, baik atau buruk tersaji lewat *infotainment* itu. Dalam hal ini, media massa tidak lagi berperan sebagai tuntunan, tetapi lebih berorientasi tontonan semata.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita juga disuguhi adegan ‘perkelahian’ ala wakil rakyat, rebutan jabatan pimpinan partai politik, ada pemimpin yang ‘berkata kasar dan kotor’, tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang makin merejalela, proses penegakkan hukum dan peradilan yang melukai rasa keadilan masyarakat, konflik masyarakat yang berakar dari perbedaan SARA, serta berbagai perilaku penyelenggara negara yang tidak memberi teladan baik bagi warga bangsanya.

Persoalan multidimensi di atas, diungkap sebab kita (komunitas PKn) patut merasa prihatin, dan perlu turut ambil bagian memecahkan persoalan itu. Kita perlu melatih warga negara agar memiliki komitmen untuk melaksanakan fungsi *amar ma’ruf nahi munkar* (menyuruh kepada kebajikan dan mencegah tindakan yang merusak) sebagai bagian dari akhlak kewargaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akhlak kewargaan perlu terus dikuatkan melalui PKn, terutama menghadapi penetrasi budaya yang tidak sesuai dengan nilai dan karakter bangsa Indonesia. Lebih-lebih pada masyarakat Indonesia yang multikultural yang menurut Winataputra (2012) dikonsepkan dan dibangun dalam konteks negara-kebangsaan Indonesia modern. Hal itu menurut Winataputra (2012) dapat dicermati dari dinamika praksis kehidupan bernegara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai saat ini dengan mengacu pada konstitusi UUD 1945, dan praksis kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konsep masyarakat multikultural (*multicultural society*) perlu dibedakan dengan konsep masyarakat majemuk (*plural society*) yang menunjukkan keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaan suku bangsa. Multikulturalisme dikembangkan dari konsep pluralisme budaya dengan menekankan pada kesederajatan kebudayaan yang ada dalam sebuah masyarakat (Suparlan, 2005:98). Multikulturalisme ini mengusung semangat untuk hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*) dalam perbedaan kultur yang ada baik secara individual maupun secara kelompok dan masyarakat (Azra, 2006, Suparlan, 2005). Individu dalam hal ini dilihat sebagai refleksi dari kesatuan sosial dan budaya dimana mereka menjadi bagian darinya. Dengan demikian, corak masyarakat Indonesia bukan lagi keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Tabel 2 Transformasi Masyarakat Indonesia *Bhinneka Tunggal Ika*

Masyarakat Majemuk (<i>plural society</i>)	Masyarakat Multikultural (<i>multicultural society</i>)
terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, namun tanpa membaur dalam satu unit politik yang tunggal.	sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain.

Sumber: (Arif, 2008)

Perubahan cara berpikir pluralisme menjadi multikulturalisme yang melandasi realitas multikultural Indonesia adalah perubahan kebudayaan yang menyangkut nilai-nilai dasar yang tidak mudah diwujudkan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai konsep multikulturalisme yang sesuai dengan konteks Indonesia, dan pemahaman itu harus berjangka panjang, konsisten, dan membutuhkan kondisi politik yang mendukung.

Masyarakat baru yang merupakan pergeseran dari masyarakat majemuk ke masyarakat multikultural Indonesia yang dicita-citakan adalah masyarakat yang menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai yang mengatur kehidupannya sebagai warga suatu bangsa. Dalam pandangan Rahardjo (1999:111), konsep masyarakat baru itu disebut masyarakat utama sebagai masyarakat yang tinggi tingkat perkembangannya, yang memiliki sistem kelembagaan dan mekanisme yang menjamin berlakunya upaya-upaya masyarakat itu sendiri untuk secara otonom mampu melaksanakan fungsi *amar ma'ruf nahi munkar* dan memelihara iman.

Sebagai masyarakat yang multikultural, maka merupakan hak dari anggota masyarakat untuk mengembangkan masyarakat dan budayanya, yang pada gilirannya menyumbangkan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia. Inilah inti profil manusia Indonesia baru sebagaimana digambarkan dalam Ketetapan MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Secara umum, gambaran profil manusia Indonesia baru itu disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2 Profil Manusia Indonesia Baru

Pancasila	Nilai-nilai yang Disandang Manusia Indonesia	Sumber Nilai/Sarana
Ketuhanan Yang Maha Esa	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai-nilai etika • Nilai moral 	<ul style="list-style-type: none"> • Agama yang dihayati di dalam masyarakat Indonesia • Kebudayaan daerah (suku-suku Nusantara)
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	<ul style="list-style-type: none"> • HAM • Toleransi • Kerukunan hidup antarwarga/antara agama • Kerja sama global untuk kemakmuran dan perdamaian 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran hukum/negara hukum <p>Kerja sama internasional</p>
Persatuan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Saling menghargai perbedaan • Kemauan untuk bersatu • Menghormati simbol-simbol negara persatuan • Rasa bangga sebagai orang Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahasa Indonesia • Sistem pendidikan dan persekolahan • Interaksi antarwarga/antarsuku <p>Pendidikan multikultural</p>
Kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai-nilai demokrasi • Populis (memihak kepada kepentingan rakyat) • Teknologi yang memajukan kemakmuran rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> • Berfungsinya lembaga-lembaga demokrasi <p>IPTEK</p>
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Rasa solidaritas sosial sebagai satu bangsa 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga-lembaga sosial tradisional yang masih

Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama dalam menanggulangi masalah nasional (gotong royong) 	fungsional di daerah
-----------	---	----------------------

Sumber: (Tilaar, 2004) •

Tabel di atas menunjukkan profil manusia Indonesia, yaitu manusia Pancasila yang sedang menjadi. Profil tersebut merupakan suatu proses perwujudan nilai-nilai Pancasila yang terus berkembang. Selain itu, nilai-nilai Pancasila yang tercantum di dalam kelima sila Pancasila tersebut merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Keutuhan nilai-nilai tersebut menjiwai seluruh proses humanisasi manusia Indonesia.

Realitas multikultural bangsa Indonesia di atas memberi tantangan sekaligus peluang bagi guru PKn di sekolah. Tantangan guru PKn sekarang adalah menjadikan mata pelajaran itu berkhidmat kepada, dan mendorong penguatan nilai-nilai kemanusiaan karena beragam persoalan sosial budaya yang muncul karena keanekaragaman yang ada. Proses PKn harus bersandar secara kukuh kepada budaya Indonesia untuk melahirkan pandangan dunia, nilai-nilai, dan komitmen terhadap nilai-nilai dan keluruhan martabat manusia yang bertumpu pada kejujuran dan pertanggungjawaban. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Banks (2007) yang menyatakan sekolah sedapat mungkin mempersiapkan para siswa dari berbagai ras, etnis, budaya dan kelompok bahasa ke arah warga negara yang efektif dan merefleksikan budaya dan komunitas kewargaan.

Perlu disadari, bahwa masyarakat multikultural Indonesia tidaklah selalu berdampak positif, melainkan tersimpan beragam potensi konflik yang sewaktu-waktu muncul. Karena itu, empati dan toleransi menjadi nilai dasar yang perlu terus dikembangkan baik dalam proses maupun sebagai output pendidikan. Membawa siswa pada persoalan yang kompleks dan spektrum ruang kelas PKn yang luas dirasa tepat, karena sebagaimana dalam kajian Sosiologi, tindakan manusia tidak pernah terjadi dalam "pulau kosong". Dalam konteks ini, pembinaan nilai-nilai akhlak kewargaan tidak bisa dilepaskan dari pembentukan iklim sosial yang kondusif bagi munculnya sikap toleran, egaliter, dan partisipatif. Menurut Abdullah (2005), upaya meminimalisir konflik yang terpenting (termasuk dalam masyarakat yang multikultural) adalah melalui penanaman kesadaran kepada masyarakat akan keragaman (*plurality*), kesetaraan (*equality*), kemanusiaan (*humanity*), keadilan (*justice*) dan nilai-nilai demokrasi (*democratic values*). Dan kesemua itu, dapat dilakukan melalui pembelajaran PKn. Inilah peluang yang dapat kita ambil sebagai komunitas PKn dalam rangka turut berkontribusi membangun bangsa.

Gagasan Kajian Akhlak Kewargaan Perspektif Islam

Mengangkat Islam (yang bersumber pada Qur'an dan Sunnah) sebagai dasar kajian akhlak kewargaan dalam PKn tentu bukanlah hal yang biasa. Sepanjang pemahaman penulis, kajian tentang *civic virtue* sebagai komponen penting budaya kewargaan (*civic culture*) diartikan sebagai kebajikan kewargaan yang bersumber dan berorientasi pada nilai-nilai kebajikan umum (etika/moral). Tidak hanya pada lembaga pendidikan umum yang peserta didiknya berasal dari beragam latar belakang suku bangsa, bahasa, dan agama yang berbeda, tetapi pada lembaga pendidikan dengan label

agama-pun (termasuk Islam) yang cenderung peserta didiknya homogen dari sisi keyakinan agama, kajian kebajikan kewargaan dalam PKn 'selalu' bersandar pada nilai-nilai kebajikan umum itu.

Walaupun begitu, 'usaha untuk memberikan warna ke-Islam-an dalam kajian PKn, pernah dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta – dan diikuti oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang menyusun buku ajar "PKn (*Civic Education*) untuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah". Selain itu, melalui Indonesia Center for Civic Education (ICCE) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dikembangkan model PKn di Perguruan Tinggi Islam dengan mengembangkan buku ajar "PKn (*Civic Education*): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani".

Usaha di atas – sekalipun baru pada tataran mata kuliah umum di perguruan tinggi – patut diapresiasi, sebagai bagian dari penyebarluasan nilai-nilai Islam dan kebajikan kewargaan melalui PKn. Sayaangnya, gagasan itu belum secara umum dikembangkan sebagai ranah kajian – lebih-lebih menjadi penciri – kajian PKn pada jurusan/program studi PKn/PPKn pada Perguruan Tinggi/LPTK (berbasis) Islam. Persinggungannya dengan kajian Pendidikan Agama (Islam) dan Budi Pekerti barangkali menjadi salah satu alasan komunitas PKn lebih memilih membahas nilai-nilai kebajikan kewargaan tanpa memperkuatnya dengan nilai-nilai agama. Karenanya, tidak keliru, kalau seorang cendekiawan muslim di negara kita dalam ceramah yang penulis ikuti, pernah menyampaikan kritik untuk pembelajaran PKn dengan menyebut kajian PKn di sekolah mengajarkan faham pluralisme agama, yang menganggap semua agama baik, hanya demi menjaga nilai-nilai kebaikan bersama.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpandangan, bagi komunitas PKn pada lembaga-lembaga pendidikan (berbasis) Islam, *civic virtue* perlu dipandang dan dipahat sebagai akhlak kewargaan yang bersumber pada nilai-nilai Islam. Ini menuntut komunitas PKn untuk mengembangkan, memperkuat dan membelajarkan akhlak kewargaan sebagaimana Islam menghendakinya. Hal ini sejalan dengan sasaran akhir PKn untuk pembentukan warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*), dimana salah satu komponen warga negara demikian adalah ketaatannya kepada agama yang dianutnya. Bagi penulis, ketaatan kepada agama yang diyakini menjadi penting sebagai dasar mewujudkan masyarakat Indonesia baru yang dicita-citakan. Sebab, agama (Islam) secara lengkap telah mengatur aspek keberagamaan seseorang baik dalam urusan akidah, ibadah, akhlak, dan urusan mu'amalah.

Dalam hal akhlak, Islam telah memberikan rumusan penting dan komprehensif perlunya warga negara memiliki akhlak yang baik dalam hubungannya dengan Allah SWT, dengan Rasulullah SAW, akhlak sebagai pribadi warga negara, akhlak dalam lingkungan keluarga, akhlak dalam kehidupan bermasyarakat, maupun akhlak warga negara dalam hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah rumusan lengkap akhlak kewargaan yang dapat menunjang terbentuknya warga negara Indonesia yang cerdas dan baik.

Secara umum, Islam didefinisikan sebagai nama agama Allah (*dienullah*) yang diwahyukan kepada para Rasul-Nya sejak Nabi Adam AS sampai kepada Nabi Muhammad SAW (Ilyas, 2011:41). Secara khusus, Islam adalah nama diri dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai mata rantai akhir dari agama Allah yang diturunkan kepada umat manusia. Sebagai mata rantai akhir dari agama Allah,

Islam yang dibawa oleh penutup para nabi ini telah disempurnakan dan dinyatakan oleh Allah sebagai agama yang diridhai-Nya untuk seluruh umat manusia sampai hari akhir nanti.

Islam memiliki beberapa ciri khusus (Ilyas, 2011, p. 43) sebagai berikut:

1. Islam adalah agama yang bersumber dari Allah SWT baik melalui wahyu secara langsung (Al Qur'an) maupun tidak langsung (Sunnah Nabawiyah) (QS 39:2; 32:2)
2. Ajaran Islam bersifat komprehensif (mencakup seluruh aspek kehidupan) (QS 6:38)
3. Ajaran Islam bersifat universal (berlaku untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman (QS 7: 158)
4. Ajaran Islam sesuai dengan fithrah manusia (QS 30:30)
5. Ajaran Islam menempatkan akal manusia pada tempat yang sebaik-baiknya secara proporsional, tidak mendewakan dan tidak pula menghinakannya (QS 7:179; 31:20)
6. Ajaran Islam menjadi rahmat bagi alam semesta (QS 21:107)
7. Ajaran Islam berorientasi ke masa depan (akhirat) tanpa melupakan masa kini (dunia) (QS 28:77)
8. Ajaran Islam menjanjikan surga bagi yang beriman dan neraka bagi yang kufur (QS 98:6-8)

Secara garis besar, ajaran Islam mencakup empat aspek yaitu aqidah, akhlak, ibadah, dan *mu'amalah duniawiyah* (Ilyas, 2011, p. 44).

1. Aqidah: aspek keyakinan terhadap Allah, para malaikat, kitab-kitab suci, para nabi dan rasul, hari akhir dan taqdir.
2. Ibadah: Segala cara dan upacara pengabdian kepada Allah (ritual) yang telah diperintahkan dan diatur tata cara pelaksanaannya dalam Al Qur'an dan Sunnah seperti shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya.
3. Akhlak: Nilai dan perilaku baik yang harus diikuti seperti sabar, syukur, tawakkal, berbakti pada kedua orang tua, berani dan lain sebagainya, serta nilai dan perilaku buruk yang harus di jauhi seperti sombong, takabur, dengki, riya, durhaka kepada kedua orang tua dan lain sebagainya.
4. Mu'amalah: Aspek kemasyarakatan yang mengatur pergaulan hidup manusia di atas bumi, baik tentang harta benda, perjanjian-perjanjian, ketatanegaraan, hubungan antara negara dan lain sebagainya.

Perkataan akhlak sesungguhnya adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Akhlak menurut Ilyas (2015:5) haruslah bersifat konstan, spontan, tidak temporer dan tidak memerlukan pemikiran dan pertimbangan serta dorongan dari luar. Dengan demikian, akhlak kewargaan sesungguhnya adalah sikap dan perilaku warga negara yang bersifat konstan, spontan, tidak temporer dan tidak memerlukan pemikiran dan pertimbangan, serta dorongan dari luar.

Dilihat dari ruang lingkupnya, dengan merujuk pada pendapat Muhammad Abdullah Draz, Ilyas (2015:5) menyatakan bahwa akhlak (kewargaan) dalam perspektif Islam dapat dikelompokkan ke dalam lima bagian: akhlak pribadi, akhlak berkeluarga, akhlak bermasyarakat, akhlak bernegara, dan akhlak beragama. Dengan

demikian, akhlak kewargaan, sebagaimana kita sebut sebagai komponen penting budaya kewargaan bagi terwujudnya masyarakat demokrasi Indonesia yang kuat, mencakup spektrum yang luas, meliputi seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan Allah SWT maupun secara horizontal sesama makhluk-Nya.

Dalam kerangka pengembangan kajian PKn – termasuk akhlak kewargaan – pada lembaga pendidikan (berbasis) Islam, penulis berpandangan dan mengajak kepada komunitas PKn untuk membangun atmosfer akademik penguatan kajian akhlak kewargaan perspektif Islam melalui: 1) kajian rutin akademik dengan melibatkan dan mensinergikan komunitas PKn dan komunitas pendidikan Agama dan Budi Pekerti (seperti kelompok dosen/guru Agama Islam) – termasuk para pemuka Agama Islam – untuk melahirkan gagasan dan tanggung jawab bersama dalam pembentukan dan penguatan akhlak kewargaan bagi warga negara; 2) menyebarluaskan gagasan perlunya penguatan akhlak kewargaan perspektif Islam dalam berbagai forum ilmiah; 3) memasukkan nilai-nilai Islam (yang bersumber dari Al Qur'an dan As Sunah) dalam proses pembelajaran di kelas PKn; dan 4) komunitas PKn diharapkan dapat menjadi teladan yang mencerminkan akhlak kewargaan terpuji bagi para warga negara yang lainnya (termasuk bagi para peserta didik), baik dalam hubungannya dengan Allah SWT, dengan Rasulullah SAW, akhlak sebagai pribadi warga negara, akhlak dalam lingkungan keluarga, akhlak dalam kehidupan ber masyarakat, maupun akhlak warga negara dalam hubungannya dengan kehidupan ber bangsa dan bernegara.

Penulis meyakini, melalui penguatan akhlak kewargaan perspektif Islam yang berdimensi luas pada kajian PKn, komunitas PKn – terutama pada lembaga pendidikan (berbasis) Islam – dapat memberikan kontribusi besar bagi perbaikan dan pengembangan bangsa dan karakter menuju masyarakat Indonesia baru yang dicita-citakan.

Simpulan

Mengangkat Islam sebagai dasar pijakan bagi pengembangan PKn, termasuk akhlak kewargaan, sebagaimana dikemukakan di atas tidaklah semudah yang dibayangkan. Perlu kesungguhan dari komunitas PKn untuk mengembangkan, memperkuat, dan membelajarkan kajian-kajian PKn perspektif Islam. Dan hal itu dapat diawali pada komunitas-komunitas PKn di lembaga pendidikan Islam, seperti pada perguruan di lingkungan organisasi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, dan sebagainya. *Wallahu'alam bi shawab.*

Daftar Rujukan

- Abdullah, A. (2005). Kesadaran Multikultural: Sebuah Gerakan "Interest Minimalization" dalam Meredakan Konflik Sosial. In M. A. Yaqin, *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan* (pp. xi-xx). Yogyakarta: Pilar Media.
- Arif, D. B. (2008). *Pengembangan Warga Negara Multikultural Implikasinya terhadap Kompetensi Kewarganegaraan*. Sekolah Pascasarjana, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Azra, A. (2006). Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme. In *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan*

- Modernitas. Bogor: Brighten Press.
- Banks, J. A. (2007). *Educationg Citizen in a Multicultural Society* (2 ed.). New York: Teachers College Press.
- Chamim, A. I. (2003). Civic Education di Perguruan Tinggi: Beberapa Catatan Pengalaman. In S. Malian, & S. Marzuki (Eds.), *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia* (pp. 5-16). Yogyakarta: UII Press.
- Ilyas, Y. (2011). *Cakrawala Al-Qur'an: Tafsir Tematis tentang Berbagai Aspek Kehidupan*. Yogyakarta: Itqan Publishing.
- Ilyas, Y. (2015). *Kuliah Akhlaq*. Yogyakarta: Kerjasama Lembaga Pengembangan dan Studi Islam UAD dengan Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam UMY.
- Kantaprawira, R. (1988). *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru.
- Mujani, S. (2007). *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Quigley, C. N., & Bahmueller, C. F. (1991). *Civitas: A Framework for Civic Education*. Calabasas: Center for Civic Education.
- Rahardjo, D. (1999). *Masyarakat Madani, Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Kerjasama Pustaka LP3ES dan Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF).
- Suparlan, P. (2005). *Sukubangsa dan Hubungan Antar Sukubangsa*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- The LIFE Center and Center for Multicultural Education. (2007). *Learning in and out of School in Diverse Environment: Life-Long, Life-Wide, Life-Deep*. Seatle: Center For Multicultual Education.
- Tilaar, H. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Winataputra, U. S. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)*. Bandung: Widya Aksara Press.